



**PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2013**

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

LAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERUMAHAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
A PENDAHULUAN.....	1
A.1 Latar Belakang	1
A.2 Tujuan dan Sasaran	3
A.2.1 Tujuan.....	3
A.2.2 Sasaran	3
A.3 Ruang Lingkup	3
A.3.1 Ruang Lingkup Spasial	3
A.3.2 Ruang Lingkup Substansi.....	3
A.4 Dasar Hukum	4
A.5 Sistematika Pembahasan.....	4
B TINJAUAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DIY DAN KEBIJAKAN SEKTORAL PERUMAHAN	6
B.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005 – 2025)	6
B.1.1 Lima Tahun Kedua (2010-2014)	6
B.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2012– 2017)	7
B.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY 2009 – 2020	9
B.3.1 Kebijakan Permukiman Menurut RTRW DIY	9
C GAMBARAN KONDISI UMUM DIY DAN SEKTOR PERUMAHAN DI DIY	11
C.1 Kondisi Umum DIY	11
C.2 Gambaran Umum Sektor Perumahan DIY.....	20
C.3 Indikator dan Capaian Kinerja Bidang Perumahan.....	20
D ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN SEKTOR PERUMAHAN DI DIY.....	26
D.1 Isu Strategis Bidang Perumahan.....	26
D.2 Permasalahan Bidang Perumahan.....	27
D.2.1 Identifikasi Permasalahan	27
D.2.2 Prioritas Permasalahan Sektor Perumahan di DIY	30
E Analisis Permasalahan Prioritas Sektor Perumahan di DIY	33
E.1 Masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH)	33
E.2 Masih adanya Permukiman Kumuh.....	36
E.3 Evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan dari Tahun 2010 – Th 2012 :	36
E.4 Kebutuhan rumah (baglog).....	37
E.5 Evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan dari Tahun 2010 – Th 2012.....	38

F	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKTOR PERUMAHAN DI DIY	45
G	REKOMENDASI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR PERUMAHAN DI DIY TAHUN 2014....	49
H	KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERUMAHAN	55
H.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	55
H.2	Pendanaan Pembangunan Sektor Perumahan.....	56
H.3	Perubahan APBD tahun 2013	59
H.4	KUA PPAS Sektor Perumahan Tahun 2014	61

DAFTAR TABEL

Tabel C.1	Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010 menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota	12
Tabel C.2	Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2007 – 2011	13
Tabel C.3	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kota/Desa di DIY, 2007-2011	14
Tabel C.4	Data Jumlah RTLH di Kabupaten Kulonprogo	16
Tabel C.5	Data jumlah TRLH di Kabupaten Bantul	16
Tabel C.6	Data Jumlah RTLH di Kabupaten Gunungkidul	17
Tabel C.7	Data Jumlah RTLH di Kabupaten Sleman	18
Tabel C.8	Data jumlah RTLH di Kota Yogyakarta	18
Tabel C.9	Rekapitulasi Rumah Tidak Layak Huni di DIY	19
Tabel C.10	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di DIY	19
Tabel C.11	Penyediaan Perumahan di DIY Tahun 2012	22
Tabel C.12	Kawasan Kumuh di DIY	24
Tabel C.13	Penataan Kawasan di DIY Tahun 2012	25
Tabel D.1	Jumlah Sebaran Perumahan di DIY	28
Tabel D.2	Penentuan Permasalahan Perumahan dari Aspek keberlanjutan	30
Tabel D.3	Penentuan Permasalahan Perumahan dari Logika Keberlanjutan	30
Tabel E.1	Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota di DIY 2012 – 2018 (orang)	33
Tabel E.2	Jumlah Penduduk Miskin dan Tidak Miskin di DIY	34
Tabel E.3	Prosentase Penduduk Miskin dan Tidak Miskin di DIY	34
Tabel E.4	Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perumahan di DIY (2011 -2013)	39
Tabel E.5	Alokasi Anggaran Sektor Perumahan di Dinas PUP ESDM DIY 2013	41
Tabel E.6	Alokasi Anggaran Sektor Perumahan 2013 untuk Kabupaten Gunungkidul	42
Tabel E.7	Alokasi Anggaran Sektor Perumahan 2013 untuk Kabupaten Kulon Progo	42
Tabel E.8	Alokasi Anggaran Sektor Perumahan 2013 untuk Kabupaten Bantul	43
Tabel E.9	Alokasi Anggaran Sektor Perumahan 2013 untuk Kabupaten Sleman	43
Tabel E.10	Alokasi Anggaran Sektor Perumahan 2013 untuk Kota Yogyakarta	44
Tabel F.1	Indikator, Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 – 2017	48
Tabel G.2	Usulan Program dan Kegiatan Sektor Perumahan APBD DIY 2014	51
Tabel H.1	Kontribusi PDRB Sektoral Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000) 2011 – 2015 (%)	55
Tabel H.2	Pagu APBD DIY Tahun 2012 – 2013 untuk Program-Program Perumahan	57
Tabel H.3	Pagu KUA-PPA Tahun 2014 untuk Program-Program Perumahan	57
Tabel H.4	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Kinerja Sektor Perumahan Pada KUA-PPA 2014	57
Tabel H.5	Arahan Kebijakan Umum Anggaran dan Sinkronisasi Pendanaan dari Sumber Lain	59
Tabel H.6	Arahan Alternatif Usulan Kegiatan Melalui APBDP 2013	60
Tabel H.7	KUA-PPAS Sektor Perumahan Tahun 2014	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar C.1	Peta Administrasi DIY	11
Gambar C.2	Grafik Kepadatan Penduduk DIY	12
Gambar C.3	Grafik Rasio Gini	13
Gambar C.4	Grafik Prosentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan.....	14
Gambar D.1	Peta Distribusi Perumahan di DIY	28
Gambar D.2	Keterkaitan Permasalahan Sektor Perumahan	32
Gambar E.1	Peta Sebaran Kecamatan Miskin di DIY	34
Gambar E.2	Grafik Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	35
Gambar E.3	Grafik Alokasi Anggaran Penataan Kawasan Kumuh	36
Gambar E.4	Grafik Alokasi Anggaran Peningkatan Peran Serta Masyarakat	37
Gambar E.5	Grafik Alokasi Anggaran Fasilitasi Pembangunan Sarpras Berbasis masyarakat..	38

A PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor yang strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, “papan” juga berfungsi strategis di dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi akan datang yang berjiwa diri sehingga penyelenggaraan perumahan dan permukiman selayaknya diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi setiap orang atau keluarga yang mampu bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara tegas disebutkan, negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Oleh karenanya upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap luasan lahan yang akan digunakan terutama untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman. Tuntutan akan kebutuhan lahan ini membuat pengaruh sebuah kota melebar ke daerah-daerah disekitar kota khususnya diwilayah pinggiran (*urban periphery*). Hal ini bisa dilihat dari tingginya perubahan alih fungsi lahan yang pada awalnya merupakan lahan non terbangun atau lahan pertanian menjadi lahan terbangun (*Urban Sprawl*). Fenomena lompat katak ini sudah sangat umum terjadi di kota-kota besar di Indonesia dan dampak *Urban sprawl* yang menyebabkan semakin tingginya intensitas pembangunan perumahan dan permukiman dan membuat penggunaan lahan menjadi tidak terkontrol dengan baik sehingga banyak fasilitas-fasilitas yang sebenarnya sangat diperlukan dan disediakan di area hunian menjadi tidak tersedia, seperti ruang publik dan juga ruang terbuka hijau. Ruang Publik dinilai sangat penting karena menjadi tempat interaksi sosial antara masyarakat perumahan dan permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman secara eksisting menggunakan atau memanfaatkan ruang terbesar dari suatu kawasan baik di perkotaan maupun di perdesaan, dan kegiatannya bersifat menerus mengikuti kebutuhan penduduk akan hunian. Karenanya pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman harus senantiasa memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukung serta dampak akibat pembangunan tersebut. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, disamping dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap kelestarian lingkungan juga keseimbangan daya dukung lingkungan harus senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, agar arah perkembangannya tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kemampuan pemerintah daerah sendiri untuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman relatif sangat terbatas. Sementara itu walaupun masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggungjawab individual. Oleh karenanya sumber daya dan potensi masyarakat perlu ditumbuhkembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan perumahan dan permukimannya secara mandiri, dengan didukung oleh upaya pemerintah melalui penciptaan iklim yang kondusif. Ketidakmampuan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahannya lebih sering dikarenakan iklim yang ada belum secara optimal memberikan ruang, kesempatan dan peluang yang memadai bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya. Masyarakat berpenghasilan rendah harus terus didorong dan difasilitasi agar memperoleh kemudahan atau akses pada kepemilikan rumah. Pemerintah Daerah DIY sendiri telah banyak mengembangkan skema kepemilikan rumah untuk masyarakat miskin salah satunya dengan bantuan stimulan APBD untuk meningkatkan kondisi rumah menjadi layak huni, pembinaan, pengembangan dan pembangunan perumahan (Pergub DIY No.41 Tahun 2008)

Sejalan dengan kebijakan nasional pembangunan perumahan dan permukiman maka Pemda DIY lebih diarahkan pada pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya, dan secara lebih khusus meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak dan terjangkau, baik melalui penyediaan Rumah Susun atau pemberian bantuan stimulan untuk menuju rumah layak huni, dan perbaikan sarana dan prasarana umum lingkungan agar tidak mengarah menjadi permukiman kumuh. Di samping itu pemerintah juga mendorong peran swasta untuk turut berperan dalam penyediaan rumah yang murah dan terjangkau.

Dalam kerangka penyelenggaraan perumahan dan permukiman pada umumnya perlu memperhatikan permasalahan selain menyangkut fisik perumahan juga terkait dengan penataan ruang. Di dalamnya termasuk pengadaan prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar dapat mendorong terwujudnya keseimbangan antara pembangunan di perkotaan dan perdesaan, serta perkembangan yang terjadi dapat tumbuh secara selaras dan saling mendukung. Dengan keseimbangan tersebut diharapkan perkembangan ruang-ruang permukiman yang ada akan dapat ikut mengendalikan terjadinya migrasi penduduk. Oleh karenanya, ke depan diperlukan pengembangan perencanaan dan perancangan, serta pembangunan perumahan dan permukiman yang berkontribusi terhadap pencapaian penataan ruang yang disusun secara transparan dan partisipatif serta memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama. Dengan demikian diharapkan akan terwujud permukiman yang dapat mendukung perikehidupan dan penghidupan penghuninya, baik di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, maupun kawasan-kawasan tertentu lainnya.

Pada dasarnya pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang menggunakan ruang yang luas sebagai unsur pokoknya. Penataan ruang pada dasarnya mengatur, mengendalikan dan mengawasi penggunaan lahan. Tata ruang harus menjaga agar benturan kepentingan tidak terjadi yang nantinya dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan arah perkembangan perkotaan. Oleh karenanya rencana tata ruang harus menjamin pengalokasian lahan perumahan dan permukiman yang adil dan merata antara kepentingan pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dengan berbagai karakter dan tingkat ekonominya. Tata ruang menjadi alat untuk dapat memberdayakan masyarakat mendapatkan kemudahan kredit, perizinan, serta keadilan pelayanan umum.

Bappeda DIY selaku institusi perencana di daerah perlu melakukan kajian perencanaan pembangunan dalam hal ini melakukan kajian perencanaan di sektor Perumahan, meliputi kajian terhadap program dan kegiatan baik yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dan maupun pelaksanaan pada tahun berjalan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tahun yang akan datang agar dapat menentukan skala prioritas penanganan permasalahan yang paling mendesak di sektor Perumahan sehingga perencanaan dapat lebih efektif dan efisien. Selanjutnya proses dan hasil dari perencanaan swakelola ini akan semakin meningkatkan kualitas dan kapasitas bagi produk perencanaan pembangunan maupun SDM Perencana itu sendiri dan harapan akhir adalah produk ini dapat menjadi masukan bagi penyusunan program kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014.

A.2 Tujuan dan Sasaran

A.2.1 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan proses perencanaan melalui identifikasi permasalahan dan analisis sektor Perumahan serta rumusan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu sektor Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

A.2.2 Sasaran

Sasaran dari kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya permasalahan di sektor Perumahan serta evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun sebelumnya;
2. Tersusunnya rekomendasi penanganan permasalahan sektor Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Tersusunnya program dan kegiatan sektor Perumahan di Daerah istimewa Yogyakarta untuk perencanaan tahun 2014.

A.3 Ruang Lingkup

A.3.1 Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial dalam pembahasan Sektor Perumahan Tahun 2013, meliputi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

A.3.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Sektor Perumahan Tahun 2013 ini meliputi tinjauan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum dan kebijakan sektoral dibidang Perumahan dan kebijakan sektor lain yang saling terkait dan dibatasi hanya pada kegiatan pelaksanaan bidang Perumahan yang sesuai dengan kewenangan Provinsi atas dasar PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

A.4 Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan perencanaan pembangunan sektor Perumahan yang digunakan, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIY;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029;
11. Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 -2017.

A.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan substansi pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Sektor Perumahan Tahun 2013, meliputi :

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran kegiatan, ruang lingkup yang meliputi ruang lingkup spasial dan ruang lingkup substansi, dasar hukum serta sistematika pembahasan laporan perencanaan pembangunan sektor Perumahan.

B. TINJAUAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DIY DAN KEBIJAKAN SEKTORAL PERUMAHAN

Bab ini berisi tentang tinjauan kebijakan DIY yang diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang sudah memasuki Tahapan Lima Tahun Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya Kebijakan Permukiman di DIY serta Tugas dan Fungsi Bidang Perumahan PUP ESDM DIY.

C. GAMBARAN KONDISI UMUM DIY DAN SEKTOR PERUMAHAN DI DIY

Pada bab ini berisi mengenai gambaran kondisi umum DIY dan sektor Perumahan di DIY yang meliputi kondisi umum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan gambaran kondisi kemiskinan yang termasuk didalamnya data rumah Tidak layak Huni dari masing-masing Kabupaten dan Kota serta gambaran kondisi sektor Perumahan, meliputi capaian dan indikator kinerja sektor Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN DI SEKTOR PERUMAHAN DI DIY

Pada bab ini berisi tentang isu-isu strategis di sektor Perumahan dan permasalahan yang meliputi identifikasi permasalahan dan penentuan prioritas permasalahan Sektor Perumahan .

E. ANALISIS PERMASALAHAN PRIORITAS SEKTOR PERUMAHAN DI DIY

Pada bab ini diuraikan mengenai analisis permasalahan prioritas di Sektor Perumahan yang terdiri dari masih banyaknya rumah tidak layak huni, masih adanya permukiman kumuh, kebutuhan rumah (*baglog*) serta evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan tahun 2010 sampai dengan 2012

F. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKTOR PERUMAHAN DI DIY

Bab ini berisi rumusan strategi dan kebijakan pembangunan di Sektor Perumahan yang mengacu pada RPJMD 2013-2017 serta Indikasi rencana program prioritas DIY baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

G. REKOMENDASI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR PERUMAHAN DI DIY TAHUN 2014

Pada bab ini berisi mengenai rekomendasi hasil analisis terkait dengan kebutuhan perencanaan Tahun 2014, serta masukan untuk perumusan KUA-PPAS yang terkait dengan program/kegiatan sektor Perumahan ke depan, khususnya yang menjadi prioritas didalam perencanaan pembangunan sektor Perumahan Tahun 2014.

H. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERUMAHAN

Pada Bab ini berisi Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Pendanaan Pembangunan Sektor Perumahan, Rencana Program dan Kegiatan KUA PPAS Sektor Perumahan Tahun 2014

B TINJAUAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DIY DAN KEBIJAKAN SEKTORAL PERUMAHAN



Didalam proses perencanaan pembangunan daerah tentunya perlu dikaji perangkat kebijakan pendukung pelaksanaannya seperti yang termuat didalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DIY, serta Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah, dalam kaitan itu penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan telaah kebijakan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah

kebijakan RTRW serta sinergitasnya dengan Kebijakan Sektoral di bidang Perumahan.

B.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005 – 2025)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, rencana pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan tahapan dan prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan keutamaan permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang. Adapun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta disusun selama 25 (dua puluh lima) tahunan yang terdiri dari 5 tahapan prioritas pembangunan selama 5 tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kurun waktu tahun 2013 sudah memasuki tahapan prioritas pembangunan lima tahunan yang kedua dalam RPJPD, adapun penekanan atau prioritasnya seperti yang tertera dibawah ini.

B.1.1 Lima Tahun Kedua (2010-2014)

Penekanan pada lima tahun kedua adalah pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan.

Adapun arah dan kebijakan pembangunan Perumahan yaitu Pengurangan kesenjangan antara wilayah melalui pembangunan perumahan dan permukiman yang merata, dimana penataan ruang bagi permukiman sebagai pusat pertumbuhan baru didukung oleh sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang memadai.

B.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2012– 2017)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012 – 2017 yang disusun oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan landasan dan acuan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) di Daerah Istimewa Yogyakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator pembangunan yang menjadi komponen utama dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya setiap kegiatan perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan program/kegiatan di Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengacu pada target atau capaian indikator didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Adapun jabaran Visi, Misi, Tujuan , Sasaran dan strategi yang terkait dengan tupoksi Bidang Sarana dan Prasarana BAPPEDA DIY adalah sebagai berikut :

VISI Pembangunan DIY 2013 – 1017

“Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”

Misi 4

Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang

Tujuan

Ketersediaan layanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sasaran

Ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas maupun kualitas yang mengacu kesesuaian tata ruang ketersediaan dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana publik. pembangunan daerah yang berkelanjutan

Strategi Misi IV

1. Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang dengan menitikberatkan pada nilai budaya berbasis keistimewaan DIY dan fungsi ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Peningkatan ekonomi daerah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar melalui penyelenggaraan pelayanan infrastruktur, komunikasi dan informatika, penyediaan serta pengembangan energi dan sumberdaya mineral
3. Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan

Arah Kebijakan Misi IV terkait dengan Sektor Perumahan :

1. Menyusun perencanaan tata ruang yang berkualitas, berbasis budaya dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
2. Mendorong pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
3. Membatasi kecenderungan perkembangan wilayah terbangun pada kawasan perkotaan dan kawasan utara.
4. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di luar kawasan perkotaan dan kawasan utara.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.
6. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan minimal infrastruktur perkotaan (air limbah, drainase, persampahan).
7. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak terkait dalam pemenuhan penyediaan perumahan.
8. Mensinergikan kebijakan dan mengkolaborasikan kelembagaan dalam upaya *debottlenecking* pemenuhan kebutuhan perumahan (keterjangkauan, kelembagaan dan ketersediaan lahan).
9. Menjaga dan meningkatkan ruang terbuka hijau.
10. Meningkatkan penanganan permasalahan sampah di DIY melalui penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

B.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY 2009 – 2020

Pembahasan dalam konteks kebijakan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam laporan ini dikaitkan dengan kebijakan sektoral khususnya sektor Perumahan adalah sebagai berikut :

B.3.1 Kebijakan Permukiman Menurut RTRW DIY

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY Paragraf 6 tentang Kawasan Peruntukan Permukiman , Pasal 67, disebutkan bahwa :

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f sebagai berikut :

- a. Pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan dikembangkan menjadi kesatuan tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduknya.
- b. Pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan dikembangkan untuk :
 1. Memberikan tempat bermukim dan lingkungan kehidupan yang layak;
 2. Menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, tertib, sehat, bersih, dan nyaman; dan
 3. Mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup di sekelilingnya.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan :
 1. Mengintensifkan lahan permukiman dengan pengembangan ke atas dan ke samping.
 2. Menyediakan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang memadai.
 3. Meningkatkan pengetahuan penduduk tentang lingkungan permukiman yang sehat dan aman; dan
 4. Meningkatkan pengetahuan penduduk mengenai budi daya tanaman tahunan di permukiman desa pada kawasan lindung.
- b. Pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan:
 1. Khusus perkotaan Yogyakarta, pemanfaatan lahan permukiman dilakukan pengembangan ke atas, kecuali di kawasan cagar budaya;
 2. Menyediakan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang memadai;
 3. Mengarahkan pembangunan sarana kota sesuai dengan peringkat dan skala pelayanan yang diperlukan;
 4. mengendalikan mobilitas penduduk antar wilayah melalui pengefektifan peraturan perundang-undangan tentang kependudukan; dan
 5. menerapkan konsolidasi lahan (*urban land readjustment*) untuk pengembangan perumahan di kawasan perkotaan.

Arahan penetapan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 67 sebagai berikut :

- a. penetapan kawasan peruntukan permukiman desa di luar kota-kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- b. penetapan kawasan peruntukan permukiman kota di dalam kota-kota sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10

Merujuk pada Lampiran Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY, maka arahan penetapan Kawasan peruntukan permukiman di DIY adalah sebagai berikut :

- Penetapan Kawasan peruntukan permukiman Kota : didalam kota-kota seperti Yogyakarta, IKB Bantul, IKB Sleman, IKB Wates, IKB Wonosari, IKK Depok, IKK Kasihan, IKK Sewon, IKK Banguntapan, IKK Srandakan, IKK Kretek, IKK Piyungan, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Imogiri, IKK Pleret, IKK Sentolo, IKK asentolo, IKK Nanggulan, IKK Samigaluh, IKK Kalibawang, IKK Temon, IKK Galur, IKK Panjatan, IKK Lendah, IKK Kokap, IKK Girimulyo, IKK Tempel, IKK Turi, IKK Pakem, IKK Godean, IKK Gamping, IKK Seyegan, IKK Prambanan, IKK Kalasan, IKK Mlati, IKK Ngaglik, IKK Pathuk, IKK Playen, IKK Semanu, IKK Karangmojo, IKK Panggang, IKK Paliyan, IKK Ngawen, IKK Ponjong, IKK Semin.
- Penetapan kawasan peruntukan permukiman desa diluar kota-kota seperti tersebut diatas.

C GAMBARAN KONDISI UMUM DIY DAN SEKTOR PERUMAHAN DI DIY

C.1 Kondisi Umum DIY

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 7°33' -8°12' Lintang Selatan dan 110°00' - 110°50' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²). DIY merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri atas:

1. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02%);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91%);
3. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40%);
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04%);
5. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63%).

Selanjutnya wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa;
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa;
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 1 kelurahan dan 87desa;
4. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa;
5. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa.

Gambar C. 1
Peta Adminstrasi DIY



Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Dibawah ini dijelaskan kondisi kependudukan, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di DIY yang nantinya menjadi acuan untuk perencanaan program di sektor Perumahan dan kontribusinya untuk mendukung Program pengentasan kemiskinan di DIY , adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010

Berdasarkan hasil SP 2010, jumlah penduduk DIY tahun 2010 tercatat sebanyak 3.457.491 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 49,43% atau sebanyak 1.708.910 jiwa dan penduduk perempuan 50,57% atau 1.748.581 jiwa. Sex ratio penduduk DIY sebesar 98, yang berarti terdapat 98 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Tabel C. 1
Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010
menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kulon Progo	190.694	198.175	388.869
Bantul	454.491	457.012	911.503
Gunungkidul	326.703	348.679	675.382
Sleman	547.885	545.225	1.093.110
Yogyakarta	189.137	199.490	388.627
DIY	1.708.910	1.748.581	3.457.491

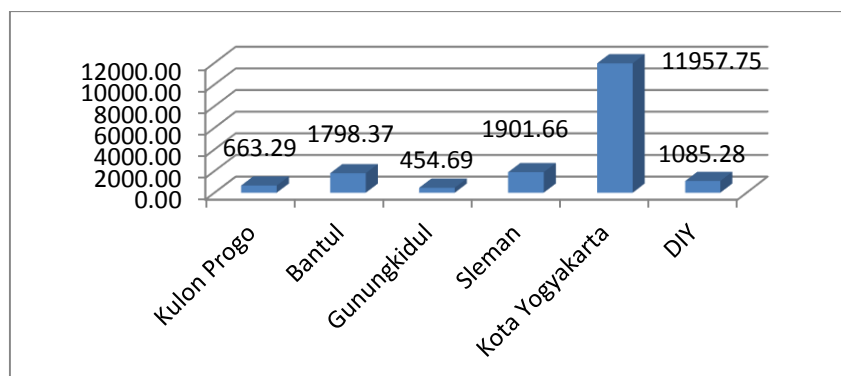
Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

Dilihat dari persebaran penduduk di DIY pada tahun 2010, jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Sleman sebanyak 1,09 juta orang atau sebesar 31,62%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bantul sebanyak 911,50 ribu orang atau 26,36%, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 675,38 ribu orang atau 19,53%, dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 388,87 ribu orang atau 11,25%. Sementara jumlah penduduk terkecil berada di Kota Yogyakarta sebanyak 388,63 ribu orang atau 11,24%.

b. Kepadatan Penduduk di DIY

Kepadatan penduduk di wilayah Provinsi DIY pada tahun 2010 sebesar 1.085,28 jiwa/Km². Daerah terpadat adalah Kota Yogyakarta yaitu 11.957,75 jiwa/Km², sedangkan kepadatan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 454,69 jiwa/Km². Secara umum, kepadatan penduduk berada pada wilayah yang relatif maju yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Gambar C. 2
Grafik Kepadatan Penduduk DIY

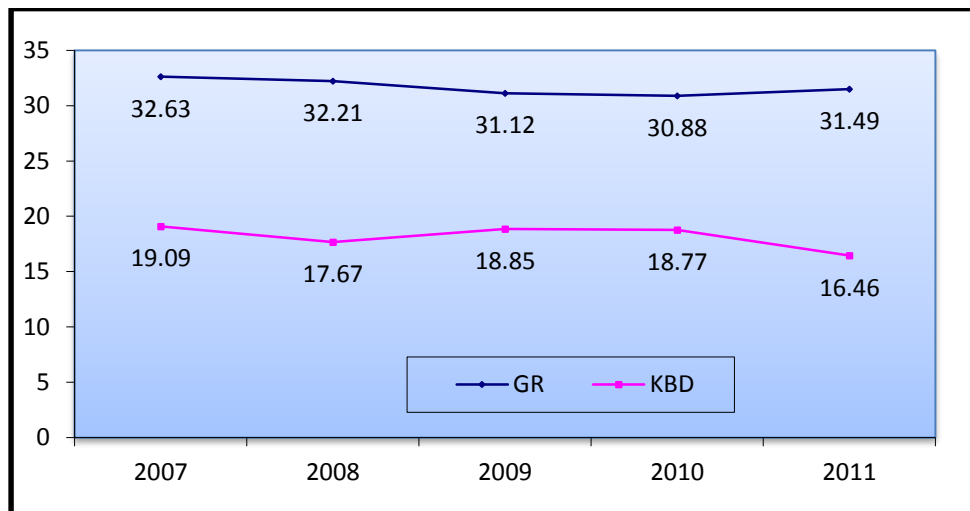


Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

c. Pemerataan Pendapatan

Rasio Gini cenderung menurun dari 32,63% tahun 2007 menjadi 31,49% tahun 2011. Demikian pula dengan ukuran Kriteria Bank Dunia (KBD), persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan terendah memiliki kecenderungan menurun dari 19,09% tahun 2007 menjadi 16,46% tahun 2011. Fenomena penurunan Rasio Gini dan persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan terendah menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di DIY semakin timpang. Namun, ketimpangan pendapatan penduduk DIY masih termasuk kategori ketimpangan sedang.

Gambar C. 3
Grafik Rasio Gini



Sumber: Analisis PDRB DIY 2007-2011 (RPJMD 2012-2017)

d. Rasio Gini dan KBD (40% Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY(%), 2007–2011

Dalam periode 2007–2011, 20% penduduk berpendapatan tertinggi memperoleh tambahan pendapatan 3,32% yang berasal dari 40% penduduk berpendapatan terendah dan dari 40% penduduk berpendapatan menengah. Pendapatan 40% penduduk berpendapatan terendah berkurang sebesar 2,31%, sedangkan pendapatan 40% penduduk berpendapatan menengah berkurang 1,03%.

Tabel C. 2
Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2007 – 2011

Indikator	2009	2010	2011
40% pendudukpendapatanterendah	18,85	18,77	16,46
40% penduduk pendapatan menengah	36,50	35,22	34,19
20% penduduk pendapatan tertinggi	44,65	46,02	49,34
Rasio Gini (%)	31,12	30,88	31,49

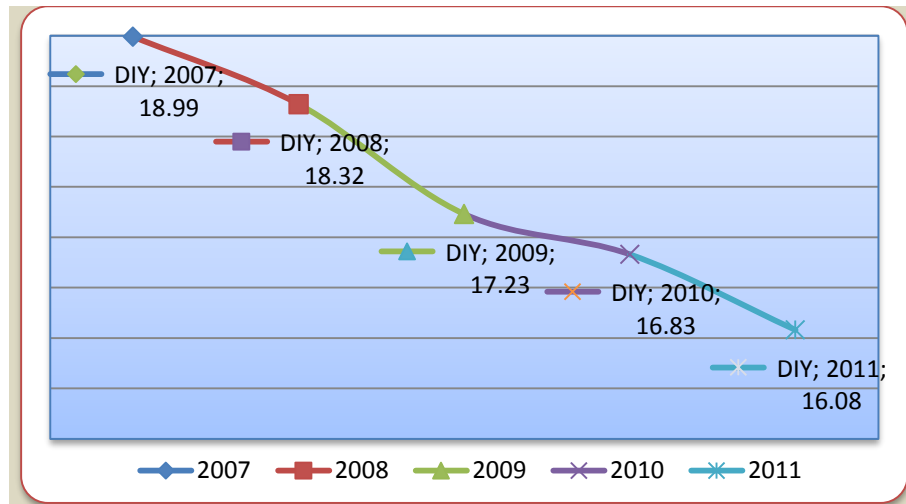
Sumber: Analisis PDRB DIY 2007-2011 (RPJMD 2013 - 2017)

e. Prosentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Grafik di bawah menunjukkan perkembangan persentase jumlah penduduk miskin DIY selama tahun 2007 hingga 2011. Dalam kurun waktu tersebut, persentase jumlah penduduk miskin DIY

mengalami penurunan. Tahun 2007 jumlah penduduk miskin DIY sebesar 18,99% menjadi 16,08% pada tahun 2011 atau turun sebesar 2,91%.

Gambar C. 4
Grafik Prosentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan



Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

f. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY , 2002-2011

Data Tahun 2011 menunjukkan jumlah penduduk miskin di DIY tercatat sebanyak 560,08 ribu orang menurun sekitar 17,22 ribu orang dari tahun 2010 yang sebesar 577,30 ribu orang. Selama kurun waktu tahun 2002 hingga 2011, secara nominal jumlah penduduk miskin di DIY menurun. Pada tahun 2002 hingga 2004, jumlah penduduk miskin di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Sementara itu, mulai tahun 2005 hingga 2011 jumlah penduduk miskin lebih banyak di perkotaan.

Tabel C. 3
Jumlah Penduduk Miskin menurut Kota/Desa di DIY, 2007-2011

Tahun	Kota (ribu orang)	Desa (ribu orang)	Total (ribu orang)
2002	303,75	331,91	635,66
2003	303,30	333,50	636,80
2004	301,40	314,80	616,20
2005	340,30	285,50	625,80
2006	346,00	302,70	648,70
2007	335,30	298,20	633,50
2008	324,16	292,12	616,28
2009	311,47	274,31	585,78
2010	308,36	268,94	577,30
2011	304,34	256,55	560,08

Sumber: DDA 2012, BPS DIY

Data-data diatas menunjukkan sebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata di wilayah DIY. Disamping itu jumlah penduduk miskin sampai dengan tahun 2012 ditengarai juga masih cukup tinggi yaitu mencapai 16,08 % dari total penduduk di DIY meskipun dari data trend jumlah penduduk miskin di DIY dari tahun 2002 sampai dengan 2011 terlihat penurunan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2002 jumlahnya mencapai 635.660 orang dan terus berkurang sampai tahun 2011 jumlahnya sebanyak 560.080 orang. Ditinjau dari pemerataan pendapatan menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di DIY semakin timpang.

Realitas angka kemiskinan di DIY masih cukup tinggi yaitu 16,08 % bahkan diatas rata-rata nasional sebesar 14 % oleh karenanya dalam rangka pengentasan kemiskinan Pemda DIY bertekad untuk mengurangi angka kemiskinan sebesar 2 % setiap tahunnya. Pemda DIY juga telah mengalokasikan dana sebesar 46 Milyar pada tahun 2013 ini untuk untuk skim pemberdayaan masyarakat. Program dan kegiatannya tidak bisa diseragamkan antara satu dan lain wilayah karena potensi masyarakat masing-masing kabupaten juga berbeda. Agar program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemda DIY tepat sasaran, Bappeda DIY telah menyusun data *by name dan by address* sekaligus profil penduduk miskin seluruh kecamatan di DIY.

Pengentasan kemiskinan dilakukan melalui berbagai strategi baik melalui pendekatan sektoral, spasial dan *net working* sehingga infrastruktur menjadi bagian penting untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Kemiskinan juga dapat didekati dari wujud atau kenampakan fisik dari hunian atau rumah warga yang tidak layak huni antara lain dari indikator dinding rumah, luasan rumah serta atap.

Pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Pemda DIY telah mengembangkan berbagai program dan kegiatan dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni.

g. Data Rumah Tidak Layak Huni Di DIY

Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidak mampuan dan tidak adanya akses bagi rakyat untuk mengambil manfaat dari proses-proses ekonomi, sosial politik bangsa dan masyarakat. Pada prakteknya penentuan kemiskinan lebih mengacu pada aspek ekonomi, dengan mengukur perbedaan tingkat pendapatan atau konsumsi antar individu berdasarkan standar kesejahteraan terukur seperti asupan kalori minimum atau garis kemiskinan. Pada tataran yang lebih operasional , kemiskinan juga terkait dengan ketidakmampuan mencapai faktor-faktor diluar pendapatan (non income factors) seperti akses pada layanan publik dan ifrastruktrur dasar yang mencakup kesehatan, pendidikan, perumahan, sanitasi dan air bersih.

Pendataan PPLS 2011 menggunakan kualitas tempat tinggal sebagai faktor penciri utama rumah tangga sasaran, sehingga dengan ciri tersebut rumah tangga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga sasaran atau tidak. Adapun data PPLS 2011 terdiri dari beberapa variabel untuk menentukan jumlah rumah tidak layak huni antara lain adalah :

- Luasan rumah < 8m – 15m²
- Lantai tanah atau bambu
- Dinding bukan tembok
- Atap selain beton

Data-data dibawah ini menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni menurut masing-masing Kabupaten dan Kota di DIY :

Tabel C. 4
Data Jumlah RTLH di Kabupaten Kulonprogo

No	Kecamatan	Jumlah Rumah		
		Miskin	Tidak Miskin	Total
1	Samigaluh	1747	415	2162
2	Kalibawang	932	174	1106
3	Girimulyo	1558	340	1898
4	Nanggulan	967	69	1036
5	Kokap	2952	473	3425
6	Pengasih	1989	241	2230
7	Sentolo	1980	155	2135
8	Temon	346	46	392
9	Wates	567	92	659
10	Panjatan	1132	67	1199
11	Lendah	969	72	1041
12	Galur	100	7	107
		15239	2151	17390

Sumber : PPLS 2011, diolah

Tabel C. 5
Data Jumlah RTLH di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Rumah		
		Miskin	Tidak Miskin	Total
1	Sedayu	219	17	236
2	Kasihan	456	36	492
3	Sewon	378	46	424
4	Banguntapan	238	14	252
5	Piyungan	253	33	286
6	Pajangan	485	18	503
7	Sewon	378	46	424
8	Pleret	545	89	634
9	Dlingo	1441	108	1549
10	Bantul	156	17	173
11	Jetis	179	28	207
12	Imogiri	1730	162	1892
13	Pandak	281	11	292
14	Bambanglipuro	135	10	145
15	Pundong	170	18	188

16	Srandakan	43	5	48
17	Sanden	70	5	75
18	Kretek	90	11	101
		7247	674	7921

Sumber : PPLS 2011, diolah

Tabel C. 6
Data Jumlah RTLH di Kabupaten Gunungkidul

No	Kecamatan	Jumlah Rumah		
		Miskin	Tidak Miskin	Total
1	Patuk	598	46	644
2	Gedangsari	2807	87	2894
3	Nglipar	1461	52	1513
4	Ngawen	2281	62	2343
5	Semin	1571	65	1636
6	Playen	3092	287	3379
7	Paliyan	1967	338	2305
8	Wonosari	725	120	845
9	Karangmojo	1217	99	1316
10	Semanu	1362	390	1752
11	Ponjong	1803	266	2069
12	Purwosari	846	63	909
13	Panggang	792	36	828
14	Saptosari	2085	35	2120
15	Tanjungsari	979	125	1104
16	Tepus	1363	219	1582
17	Rongkop	487	72	559
18	Girisubo	373	18	391
		25809	2380	28189

Sumber : PPLS 2011, diolah

Tabel C. 7
Data Jumlah RTLH di Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Jumlah Rumah		
		Miskin	Tidak Miskin	Total
1	Tempel	330	21	351
2	Turi	256	26	282
3	Pakem	106	16	122
4	Cangkringan	299	31	330
5	Sleman	444	16	460
6	Ngaglik	139	7	146
7	Ngemplak	206	15	221
8	Minggir	45	1	46
9	Seyegan	230	8	238
10	Mlati	249	13	262
11	Depok	168	23	191
12	Kalasan	264	19	283
13	Moyudan	53	3	56
14	Godean	120	1	121
15	Gamping	232	7	239
16	Berbah	157	6	163
17	Prambanan	467	41	508
		3765	254	4019

Sumber : Data PPLS 2011,diolah

Tabel C. 8
Data Jumlah RTLH di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Jumlah Rumah		
		Miskin	Tidak Miskin	Total
1	Tegalrejo	147	16	163
2	Jetis	46	12	58
3	Gondokusuman	18	0	18
4	Gedongtengen	46	8	54
5	Danurejan	61	10	71
6	Wirobrajan	27	4	31
7	Ngampilan	16	8	24
8	Gondomanan	19	3	22
9	Pakualaman	10	1	11
10	Mantriweron	106	18	124
11	Kraton	32	2	34
12	Mergangsan	87	7	94

13	Umbulharjo	102	8	110
14	Kotagede	70	10	80
		787	107	894

Sumber : Data PPLS 2011, diolah

Selanjutnya data-data rumah tidak layak huni Kabupaten dan Kota ditabulasikan menjadi total RTLH di DIY sebanyak 58.413 unit rumah, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Gunungkidul (28.189 unit) dan Kulonprogo (17.390 unit), seperti tang terlihat pada tabel berikut :

Tabel C. 9
Rekapitulasi Rumah Tidak Layak Huni di DIY

No	Kabupaten	Miskin	Tidak Miskin	Total
1	Kulonprogo	15.239	2.151	17.390
2	Bantul	7.247	674	7.921
3	Gunungkidul	25.809	2.380	28.189
4	Sleman	3.765	254	4.019
5	Kota	787	107	894
		52.847	5.566	58.413

Tabel C. 10
Persentase Rumah Tidak Layak Huni di DIY

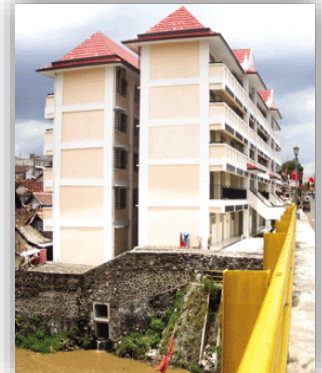
No	Kabupaten	%	%
1	Kulonprogo	87,63	12,37
2	Bantul	91,49	8,51
3	Gunungkidul	91,56	8,44
4	Sleman	93,68	6,32
5	Kota	88,03	11,97
		90,47	9,53

Data rekapitulasi dan persentase RTLH menunjukkan bahwa 90,47 % RTLH adalah signifikan merupakan penduduk miskin dan 9,53 % RTLH bukan penduduk miskin, hal ini sangat dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat salah satunya indikator RTLH adalah lantai tanah dimana banyak masyarakat pedesaan meskipun tidak tergolong warga miskin tetapi lantai rumah masih tanah yang dipadatkan (*earthen floor*).

C.2 Gambaran Umum Sektor Perumahan DIY

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa pembangunan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Dalam implementasinya, sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah masih sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat dalam hal urusan pembangunan perumahan.

Sejalan dengan kebijakan nasional pembangunan perumahan dan permukiman lebih diarahkan pada pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya, dan secara lebih khusus meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, baik melalui penyediaan Rumah Susun atau pemberian bantuan stimulan untuk menuju rumah layak huni, dan perbaikan sarana dan prasarana umum lingkungan agar tidak mewujudkan permukiman kumuh. Disamping itu peran pemerintah mendorong swasta untuk bisa dibina dalam melakukan penyediaan rumah yang murah dan terjangkau.



Upaya Pemerintah DIY untuk mengatasi masalah *backlog* perumahan dilakukan melalui Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, Pengembangan Perumahan Swadaya, Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan pembangunan rumah formal melalui pengembang. Namun upaya ini berjalan lambat karena ada beberapa kendala yang dihadapi. Target penurunan sebesar 2% di tahun 2011, sesuai capaian kinerja telah terpenuhi dengan capaian sebesar 2%. Dalam rangka memberdayakan masyarakat dari sisi penyediaan rumah yang layak huni, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan stimulan. Dalam kurun 2008-2011, capaian kinerja indikator ini mencapai 10% pertahun sesuai target yang ada.

Sebagai upaya untuk mendorong masyarakat berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah, maka pemerintah DIY setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan stimulan bahan bangunan kepada komunitas perumahan. Dari identifikasi dilakukan ada 69 kawasan kumuh yang tersebar di DIY khususnya di daerah perkotaan. Tolok ukur capaian kerja yang telah ditargetkan dilakukan melalui serangkaian kegiatan penataan kawasan padat penduduk yang cenderung kumuh. Pada akhir tahun 2011 telah dilakukan penataan 7 kawasan yang setara dengan 10% sesuai target yang dicanangkan.

C.3 Indikator dan Capaian Kinerja Bidang Perumahan

Indikator keberhasilan urusan perumahan menggunakan tolok ukur target kinerja sebagaimana telah tercantum dalam RPJMD DIY, sebagai berikut :

- 1) Persentase Penurunan Backlog dalam penyediaan perumahan 2%
- 2) Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan 10%
- 3) Prosentase Jumlah Komunitas Perumahan yang difasilitasi 5%
- 4) Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh 10%

Target tersebut dicapai melalui program-program pusat dan daerah. APBD Provinsi DIY di Tahun Anggaran 2012 dialokasikan untuk 4 program dan 8 kegiatan urusan perumahan sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006. Total anggaran yang dikeluarkan adalah Rp. 19,002,940,000 dengan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun Porgram dan Kegiatan Urusan Perumahan pada tahun 2012 antara lain :

1. Program Pengembangan Perumahan

- Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perumahan
- Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

- Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan
- Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan

3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

- Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan

4. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh

- Penataan Kawasan

Selama tahun 2012, upaya penurunan backlog penyediaan perumahan oleh pemerintah provinsi DIY dilakukan melalui program Pengembangan Perumahan, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
- 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
- 3) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Disamping hal diatas, pengurangan backlog pembangunan perumahan juga dilakukan oleh swasta melalui Pengembang. Berdasarkan data dari REI DIY, tercatat selama tahun 2012 telah dibangun 3.750 unit rumah (tersebar dalam 810 titik perumahan) yang terkonsentrasi di Bantul, Sleman, dan sebagian kecil di Kulonprogo. Sementara melalui Pemerintah, Perumnas membangun rumah 157 unit; Kementerian Perumahan Rakyat memberi stimulan sebanyak 2532 unit, membangun rumah swadaya sebanyak 1786 unit tersebar di Bantul, 196 unit di Sleman, 367 unit di Gunung Kidul dan 183 unit di Kulonprogo dan 1 *Twin Block* Rusunawa Polda DIY di Maguwoharjo, Sleman dan 1 *Twin Block* Rusunawa di Kotagede untuk total 192 unit hunian.

Sementara melalui bantuan stimulan (APBD) untuk meningkatkan rumah menjadi layak huni, selama tahun 2012 terfasilitasi 1510 unit rumah meliputi 468 unit di Kabupaten Gunungkidul, 400 unit di Kabupaten Bantul, 416 unit di Kabupaten Sleman, 140 unit di Kabupaten Kulonprogo, dan 86 unit rumah di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data realisasi diatas, selama tahun 2012 terjadi penambahan rumah baru sebanyak **6.025** unit dimana **2.275** Unit dibangun Pemerintah dan **3.750** Unit dibangun oleh Pengembang. Sedangkan Pemerintah DIY mampu menambah 1510 rumah menjadi layak huni melalui bantuan stimulan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dari sisi indikator, penurunan backlog dalam penyediaan perumahan sebanyak **6.025** Unit, setara dengan 20,44% yang berarti jauh diatas target 2% yang ditetapkan.

Tabel C. 11
Penyediaan Perumahan di DIY Tahun 2012

No.	Uraian	Lokasi	Realisasi 2012 (Unit)	
			Stimulan	Rumah Baru
I.	Pembangunan Perumahan oleh Swasta (Pengembang) (REI 2012)	Tersebar di DIY	-	3.750
II.	Pembangunan perumahan oleh pemerintah (+ Perum Perumnas)		4234	2275
A	Melalui Dana APBN		2724	2275
	Pembangunan Rumah Swadaya	Bantul, Sleman, Kulonprogo	2724	-
	Pembangunan Rusun	Sleman,Kota	-	192
	Pembangunan Hunian tetap bagi korban merapi	Sleman	-	2083
B	Melalui Dana APBD		1510	-
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		1510	-
Jumlah total penyediaan rumah di 2012 (I+II)			4.234	6.025

Sumber : DPUP – ESDM DIY 2012

Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan

Pogram Peningkatan Lingkungan sehat perumahan, dilakukan melalui kegiatan :

1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait lingkungan sehat perumahan kepada kabupaten/kota dan juga penyuluhan kepada masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan Perdesaan, merupakan pembangunan sarana dan prasana kawasan di 4 lokasi di Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan 2 lokasi di Kabupaten Bantul.

Konsep pendekatan kegiatan Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan adalah melalui Tridaya (Daya manusia, Daya Lingkungan dan daya Ekonomi), melalui penyuluhan-penyuluhan terhadap kader-kader pembangunan di masyarakat, agar mampu berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman tentang lingkungan sehat perumahan. Hal ini telah terbukti mampu menurunkan kantong-kantong kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Untuk itu DIY mendapatkan penghargaan juara I dalam pengelolaan Rusun di tingkat nasional kategori Rusun Untuk Pekerja di Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul; dan juara III Nasional katagori Penanganan Kawasan Kumuh di Rusun Graha Sejahtera, Tegalpanggung, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta.

Selain itu Penghargaan Adi Upaya Puritama yang diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat kepada Kabupaten Sleman sebagai juara III Tingkat Nasional untuk tahun 2012 membuktikan bahwa ada peningkatan kesehatan bagi lingkungan perumahan di DIY.

Berdasarkan data Review RP4D (RP3KP), di DIY terdapat di 69 kawasan dengan kriteria kumuh yang identik dengan tidak sehatnya lingkungan permukiman, dimana 11 lokasi sangat kumuh, 57 lokasi kumuh sedang dan 1 lokasi sedikit kumuh. Pada tahun 2012, telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana di 3 kawasan yang perlu ditingkatkan lingkungannya meliputi Kawasan Berbah, Kabupaten Sleman, Kawasan Imogiri, Kabupaten Bantul dan Kawasan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Dari sisi capaian target kinerja, melalui dana APBD 2012 tercapai peningkatan lingkungan sehat perumahan di 4 lokasi atau 5,8%.

Sedangkan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Peningkatan Kualitas Prasarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dialokasikan di 3 kawasan :

1. Kawasan Kabupaten Bantul
2. Kawasan Kabupaten Sleman
3. Kawasan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo

Total capaian kinerja tahun 2012 untuk dana APBN dan APBD ada 7 lokasi atau 10,26% . Prosentase ini berada diatas target tahun 2012 yaitu sebesar 10%.

Fasilitasi Bagi Komunitas Perumahan

Fasilitasi bagi komunitas perumahan dilakukan melalui Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan meliputi :

1. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat, telah dilakukan bagi komunitas perumahan di 23 lokasi
2. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan, dilakukan melalui penyuluhan kepada komunitas perumahan pada lokasi tersebut diatas.

Jumlah komunitas perumahan total di DIY tercatat 438 komunitas. Selama tahun 2012, ada 40 Komunitas Perumahan yang difasilitasi Pemerintah DIY untuk membangun sarana dan prasarana permukimannya, dengan 4 lokasi di Kota Yogyakarta, 7 lokasi di Kabupaten Bantul, 3 lokasi di Kabupaten Kulon Progo, 4 lokasi di Kabupaten Gunungkidul, dan 5 lokasi di Kabupaten Sleman.

Dari data diatas, jumlah Komunitas Perumahan yg difasilitasi APBD 2012 sebesar 9,13% (40 komunitas dari total 438 komunitas). Sementara Kementerian Pekerjaan Umum, pada tahun 2012 telah melaksanakan fasilitasi terhadap 5 Komunitas Perumahan, yang berlokasi di Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Plered Kabupaten Bantul, di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, serta Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

Sehingga capaian kinerja total untuk tahun 2012 adalah 45 komunitas yang terfasilitasi, atau sebesar 10.27% (45 komunitas dari total 438 komunitas), lebih besar dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain program pemerintah, fasilitasi terhadap komunitas perumahan juga dilakukan oleh NGO *Habitat for Humanity* (HfH) dan *Community based initiative local development* (Co-bild), dengan demikian menambah target capaian.

Pengurangan Kawasan Kumuh

Pengurangan kawasan kumuh di DIY dilakukan melalui program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh melalui kegiatan : Penataan Kawasan Kumuh.

Dari data Review RP4D (RP3KP), terinventarisasi 69 kawasan kumuh yang sebaran di masing-masing Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut :

Tabel C. 12
Kawasan Kumuh di DIY

Kab/ Kota	Jumlah
Bantul	9
Kulonprogo	10
Gunungkidul	9
Sleman	11
Yogyakarta	29

Pada tahun 2012 telah dilakukan penataan kawasan kumuh tersebut melalui dana APBD dan APBN . Dana APBD dialokasikan pada 3 kawasan dengan luas lebih kurang 15 Ha :

1. Kawasan Berbah, Kabupaten Sleman
2. Kawasan Imogiri, Kabupaten Bantul
3. Kawasan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Sedangkan dana APBN melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dialokasikan di kawasan :

1. Kawasan Winongo, Kel. Gedong Kiwo, Kota Yogyakarta,
2. Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo
3. Kawasan Mulo, Kota Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
4. Kawasan Selang, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Upaya penataan kawasan kumuh pada tahun 2012 telah dilakukan di 7 lokasi atau 10,15% dari total kawasan kumuh di DIY. Capaian ini melebihi target kinerja 2012 yang ditetapkan sebesar 10%.

Tabel C. 13
Penataan Kawasan Kumuh di DIY Tahun 2012

No.	Uraian	Lokasi	Realisasi Penataan Kawasan Kumuh di 2012	
			Kawasan	% *)
I.	Melalui Dana APBN			
1.	Penataan Kawasan Kumuh	Kota Yogyakarta	1	1,45%
		Kab. Kulonprogo	1	1,45%
		Kab. GK	2	2,90%
II.	Melalui Dana APBD			
1.	Penataan Kawasan Kumuh	Kab.Sleman	1	1,45%
		Kab. Bantul	1	1,45%
		Kab. GK	1	1,45%
Penataan Kawasan Kumuh di 2012			7	10,15%

Sumber : DPUP – ESDM DIY

*) Prosentase didasarkan pada jumlah total kawasan kumuh DIY (69 titik lokasi)

D ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN SEKTOR PERUMAHAN DI DIY

D.1 Isu Strategis Bidang Perumahan

Isu strategis penyelenggaraan di Bidang perumahan sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di dalam mengelola persoalan perumahan yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Isu kesenjangan pelayanan

Isu kesenjangan pelayanan muncul karena terbatasnya peluang untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Di samping itu juga dapat disebabkan karena konflik kepentingan akibat implementasi kebijakan yang relatif masih belum sepenuhnya dapat memberikan perhatian dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

2. Isu Lingkungan

Isu lingkungan pada kawasan perumahan umumnya muncul karena dipicu oleh tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak pemanfaatan sumber daya alam yang kurang terkendali. Kelangkaan prasarana dan sarana dasar, ketidakmampuan memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman yang ada, dan masih rendahnya kualitas permukiman baik secara fungsional, maupun visual wujud lingkungan, merupakan isu utama bagi upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan aman. Kondisi tersebut lebih lanjut apabila tidak segera diatasi akan memberikan dampak pada permasalahan tekanan terhadap lingkungan.

3. Isu manajemen pembangunan

Isu manajemen pembangunan muncul umumnya karena dipengaruhi oleh keterbatasan kinerja tata pemerintahan di seluruh tingkatan, sehingga berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, inkonsistensi di dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman, dan munculnya dampak terhadap lingkungan. Urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat juga merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menjaga agar pertumbuhannya lebih merata, termasuk dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman.

Disamping isu strategis diatas dalam konteks DIY maka yang spesifik untuk bidang perumahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Pengurangan *"backlog"* (kekurangan pemenuhan kebutuhan akan rumah versus Perubahan Lahan Non Permukiman dan Lingkungan Hidup, Pemetaan Rumah Sebagai Investasi/Tidak Ditinggali Tapi Dimiliki oleh orang diluar DIY), Peningkatan kualitas kawasan permukiman, Pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh, Pemberdayaan komunitas perumahan serta kemitraan para pemangku kepentingan bidang perumahan.

Merujuk pada RPJMD DIY 2013 – 2017 maka isu strategis di Sektor Keciaptakaryaan termasuk didalamnya Sektor Perumahan adalah sebagai berikut :

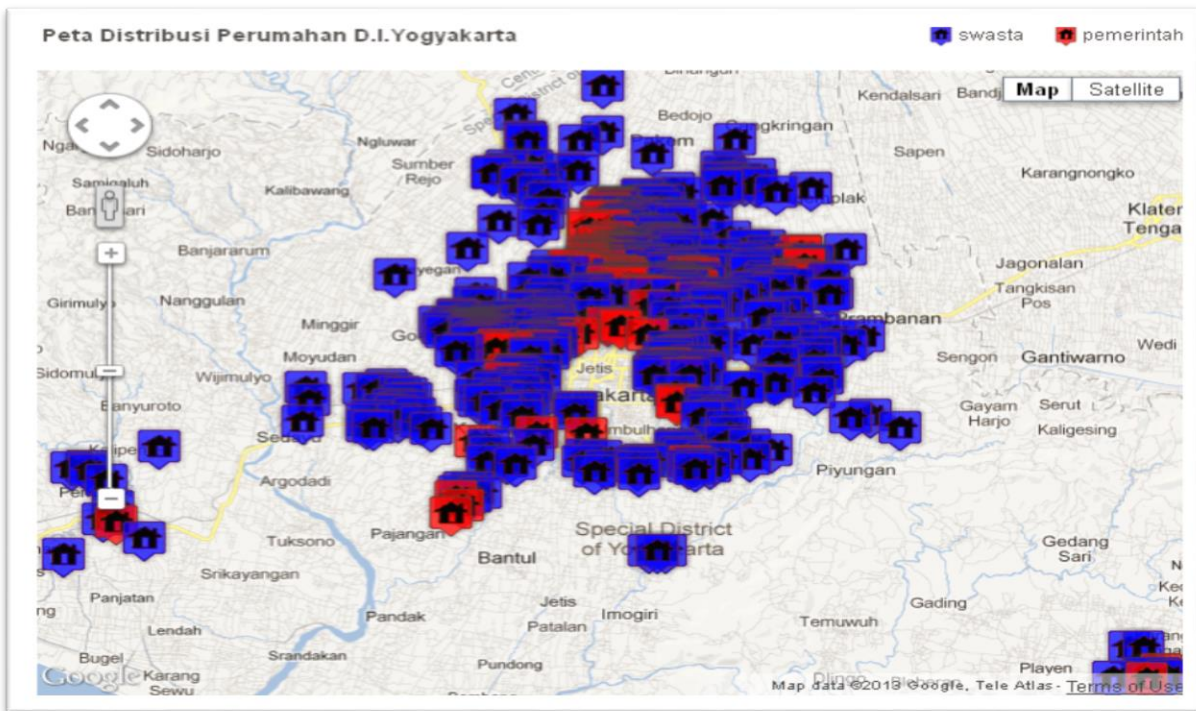
1. Kurangnya pengembangan prasarana dasar perumahan dan permukiman yang terpadu dengan memperhatikan tata ruang.
2. Belum optimalnya Pengembangan 27 isban perumahan dan permukiman layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan.
3. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan.
4. Perlunya Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan.
5. Perlunya penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya.
6. Diperlukannya keandalan bangunan gedung Negara.
7. Masih terdapatnya lokasi genangan di kawasan perkotaan Yogyakarta.
8. Belum optimalnya layanan jasa konstruksi.

D.2 Permasalahan Bidang Perumahan

D.2.1 Identifikasi Permasalahan

Secara spasial sebaran perumahan di DIY seperti terlihat dalam Peta dibawah ini menunjukkan persebaran hunian perumahan yang tidak merata, kepadatan tertinggi berada di Kabupaten Bantul diikuti dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta (ketiga wilayah ini sudah berada dalam area KPY atau Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang secara fisik karakteristiknya sudah berubah menjadi kawasan perkotaan) Kecenderungan kebutuhan rumah di Kabupaten Bantul, Sleman dan Yogyakarta yang terus meningkat karena keberadaan perguruan tinggi yang cukup banyak dan keberadaan *Central Business District (CBD)* sebagai pusat jasa layanan perkotaan sehingga permintaan hunian di ketiga wilayah tersebut juga meningkat. Selanjutnya sedang sebaran perumahan rendah ada di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar hunian disediakan oleh pengembang swasta dan sebagian kecil oleh pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Sebagai Regulator dan Pengembang Sebagai Penyedia, namun mekanisme pengendalian Lemah karena perizinan ada di Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak memiliki kewenangan dan penanganan masalah status kepemilikan lahan rendah, tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut secara rigid dan mengikat karena komitmen lemah).

Gambar D.1
Peta Distribusi Perumahan di DIY



Sumber : Pusat Informasi Perumahan Dinas PUP-ESDM DIY

Merujuk data dari Pusat Informasi Perumahan Dinas PUP-ESDM DIY Berikut jumlah sebaran perumahan di wilayah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel D. 1
Jumlah Sebaran Perumahan di DIY

Kabupaten/Kota	Jumlah Perumahan
Bantul	105
Sleman	84
Yogyakarta	19
Kulon Progo	10
Gunungkidul	8

Di wilayah DIY ditinjau dari tipologi keberadaan kawasan perumahan/permukiman dapat digolongkan menjadi beberapa tipologi dengan permasalahannya seperti dibawah ini :

1. Permukiman di kawasan tua/tradisional atau dikawasan *herritage* misalnya permukiman di kawasan Njeron Beteng, Kawasan Kotagede dikaitkan dengan Keistimewaan DIY yang mana kawasan-kawasan tua tersebut juga sebagai kawasan budaya terkait dengan awal sejarah keberadaannya dan menjadi penanda perkembangan kota, namun demikian seiring dengan perkembangan waktu, lingkungan sekitar dan pertambahan penduduk maka kawasan tua ini terbaurkan dengan permukiman penduduk yang tumbuh disekitarnya sehingga tidak nampak secara tegas keberadaannya.

2. Permukiman padat kumuh di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dimana ada bangkitan-bangkitan yang tidak difasilitasi.
3. Permukiman/perumahan yang terus bermunculan yang dikembangkan oleh developer atau pengembang swasta.
4. Adanya permukiman padat kumuh legal dan *squater*, antara lain:
 - Padat kumuh legal dipengaruhi oleh tingkat kepadatan, jarak capaian, tingkat pendapatan
 - Penduduk miskin mestinya memilih lokasi yang paling dekat dengan pekerjaan
 - penduduk mampu akan berada dipinggir kota dengan *landed house*.
5. Kawasan permukiman marginal sub urban, yaitu permukiman minus infrastruktur, hal ini karena pengembang tidak bertanggung jawab atau karena adanya bangkitan yang tidak terfasilitasi.
7. Permukiman yang *mensupport* kawasan andalan misalnya sektor Pendidikan dengan tumbuhnya kost-kostan mahasiswa sebagai dampak kebutuhan mahasiswa akan hunian dan Sektor Pariwisata dengan hotel-hotel yang tumbuh dikawasan perkotaan sebagai hunian para wisatawan, dalam kondisi normal tidak membutuhkan bangkitan layanan tetapi pada saat liburan karena tingkat hunian hotel tinggi berdampak pada padatnya transportasi kota yang menimbulkan kemacetan.
8. Permasalahan permukiman eksklusif investasi (*faktor emotional needs*), adanya kecenderungan kepemilikan rumah mewah dikalangan masyarakat berpenghasilan tinggi untuk memiliki rumah dikawasan eksklusif sebagai bentuk investasi karena nilai jual yang tinggi. Demikian pula faktor kenyamanan tinggal di Jogja menyebabkan orang luar DIY senang bertempat tinggal di Jogja dan dimungkinkan dengan *ability to pay* (kemampuan membeli) yang tinggi sehingga menyebabkan lonjakan harga tanah dan rumah di Jogja.
9. Hunian yang sifatnya *vertical living* , hal ini bisa dibedakan menjadi dua yaitu hunian yang sifatnya eksklusif (*Apartement, Condominium*) maupun hunian untuk para pekerja.
10. Isu terkait penyediaan rumah dan tantangan kedepan;

Permasalahan di Sektor Perumahan berhubungan dengan banyak faktor baik sebagai akar permasalahan maupun sebagai dampak atau akibat dari munculnya suatu faktor dimana masing-masing faktor berkaitan erat, adapun beberapa masalah terkait sektor Perumahan antara lain :

- Masih tingginya jumlah penduduk miskin di DIY
- Peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan penyediaan rumah
- Kepadatan penduduk yang tinggi di perkotaan
- Masih banyaknya rumah tidak layak huni di wilayah DIY
- Backlog rumah layak huni
- Masih Luasnya Permukiman Kumuh, terutama di Kota Yogyakarta
- Kepadatan lahan perumahan dan permukiman
- Status kepemilikan rumah

- Adanya pembangunan kawasan perumahan baru
- Kesesuaian pembangunan kawasan perumahan baru terhadap RTRW DIY
- Layanan Prasarana, sarana dan utilitas masih terbatas
- Ketersediaan lahan terbatas yang menyebabkan harga tanah mahal
- Sebagai kota pelajar dengan banyak perguruan tinggi menyebabkan kebutuhan hunian/kost-kost an meningkat
- Urban fringe (area batas luar kota yg mempunyai sifat-sifat mirip dengan kota) hanya sekitar 30 km yang mana luas dan skala kota Jogjakarta sangat nyaman untuk tinggal, memiliki aksesibilitas yang sangat bagus, karena scopenya kecil sehingga semua orang dapat melakukan ulang alik.
- Penentuan kawasan atau lokasi perumahan dan permukiman tidak secara tegas menyebut lokasi peruntukannya didalam Perda RTRW

D.2.2 Prioritas Permasalahan Sektor Perumahan di DIY

Penentuan Prioritas permasalahan agar lebih obyektif dan jika dilakukan intervensi mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang besar digunakan pendekatan penalaran sustainability yang didekati dengan 3 pilar dari sustainable development, yaitu ekonomi, lingkungan, sosial dan ditambah dengan aspek budaya. Dibawah ini adalah penentuan prioritas permasalahan:

Tabel D. 2
Penentuan Permasalahan Perumahan dari Aspek Keberlanjutan

ASPEK Keberlanjutan	RTLH	Permukiman kumuh	Kebutuhan rumah
EKONOMI	✓	✓	✓
LINGKUNGAN	✓	✓	-
SOSIAL	✓	✓	✓
BUDAYA	✓	✓	-

Tabel D. 3
Penentuan Permasalahan Perumahan dari Logika Keberlanjutan

LOGIKA Keberlanjutan	RTLH	Permukiman kumuh	Kebutuhan rumah
EKO-TEKNIK	✓	-	✓
EKO-SENTRIK	✓	-	-
EKO-ESTETIK	✓	-	✓
EKO-KULTURAL	✓	✓	-
EKO-MEDIKAL	✓	✓	-
EKO-SOSIAL	✓	✓	-

Hasil dari penilaian tersebut diatas didapatkan prioritas masalah yang dekat dengan makna lingkungan dan keberlanjutan adalah RTLH, kemudian Pemukiman kumuh, dan selanjutnya adalah kebutuhan rumah.

Berbagai permasalahan perumahan yang kompleks diatas saling mempengaruhi dan berdampak, namun demikian dari semua permasalahan tersebut dapat dikerucutkan menjadi prioritas masalah utama yang nantinya akan menjadi kegiatan prioritas untuk ditangani oleh Pemerintah DIY, yaitu :

1. **Masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH),**

Rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi permasalahan perumahan utama karena RTLH berhubungan dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembangunan yaitu:

- a. Kependudukan, berkaitan dengan jumlah
- b. Kesejahteraan, berkaitan dengan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kemiskinan
- c. Lingkungan (environment), berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan kerawanan bencana
- d. Ekonomi, berkaitan dengan SDA dan SDM

2 **Masih adanya permukiman kumuh ,**

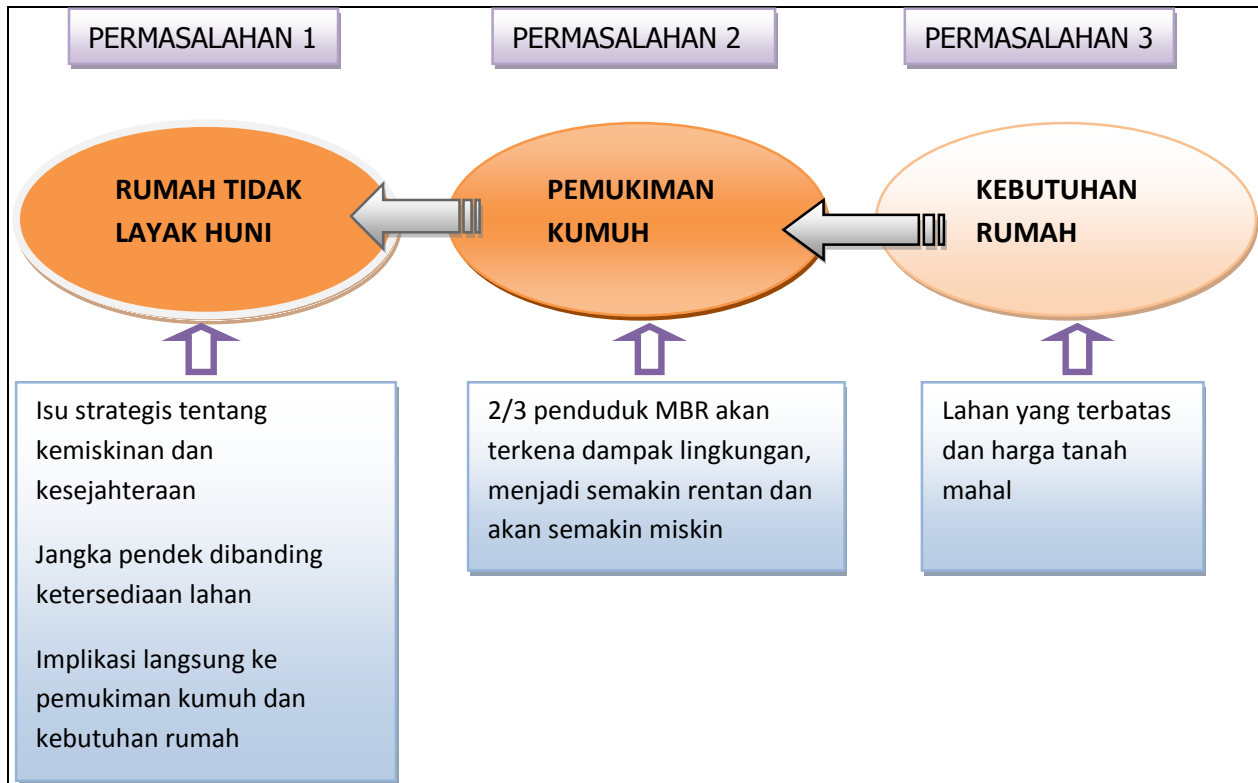
Dalam konteks perumahan, MBR dan lingkungan sangat erat kaitannya. Bila dikaitkan dengan ketergantungan MBR kepada lingkungan (environment) dan kerentanan MBR terhadap degradasi lingkungan, maka penyelesaian masalah RTLH perlu diikuti dan disinergikan dengan perbaikan prasarana sarana umum (PSU). Pemukiman kumuh diasumsikan terjadi karena keterbatasan akses MBR ke lingkungan. Dengan demikian RTLH dan permukiman kumuh saling mempengaruhi. Dengan demikian pengurangan masalah RTLH akan berpengaruh juga terhadap pengurangan masalah permukiman kumuh.

3. **Kebutuhan Rumah (*Baglog*),**

Keterbatasan lahan menyebabkan laju alih fungsi lahan yang tinggi yang berakibat berkurangnya lahan pertanian produktif menjadi lahan terbangun serta mahalnya harga tanah untuk penyediaan hunian ataupun perumahan.

Jika ketiga masalah tersebut dipetakan akan terlihat saling hubungan atau keterkaitan antara faktor satu dengan yang lain , seperti yang terlihat dibawah ini :

Gambar D. 2
Keterkaitan Permasalahan Sektor Perumahan



E Analisis Permasalahan Prioritas Sektor Perumahan di DIY

E.1 Masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH)

Isu strategis di dalam RPJMD berkaitan secara langsung dengan kemiskinan dan perumahan, yaitu dalam permasalahan pembangunan yang mencakup kesehatan, ciptakarya, dan tata ruang. Dengan demikian keberhasilan pembangunan perlu menuntaskan permasalahan-permasalahan pembangunan. Tingkat kemiskinan untuk wilayah Jawa-Bali masih terhitung tinggi, termasuk juga DIY. Kemiskinan DIY tahun 2011 adalah 560.800 orang atau 16,08 % atau ranking 24 Nasional (BPS, IV – 10 No RPJMN RPJMD DIY2012). Wilayah DIY juga rentan terhadap bencana alam baik gempa bumi, longsor, banjir dan angin kencang. Dengan demikian RTLH, pemukiman kumuh, dan kebutuhan rumah berkaitan erat dengan kemiskinan.

Menurut UNEP, dua pertiga penduduk miskin dunia akan terkena dampak degradasi lingkungan. Bila ini terjadi, maka masyarakat itu akan semakin miskin. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan sangat erat kaitannya dengan perbaikan lingkungan hidup (*environment*) maupun lingkungan sekitar (*neighborhood*).

Tabel E. 1
Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY tahun 2012 – 2018 (orang)

Kabupaen/Kota	2012	2013	2014	2015
Kota Yogyakarta	89.847	85.392	80.827	75.724
Kab. Sleman	146.650	139.266	135.644	133.508
Kab. Bantul	148.447	157.978	143.229	137.846
Kab. Kulonprogo	116.801	103.101	103.221	98.986
Kab. Gunungkidul	37.736	35.310	39.712	38.144
Jumlah	539.481	521.047	502.633	484.208

Jumlah penduduk berkategori miskin di DIY mayoritas berada di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul. Pada September 2011 tercatat, jumlah penduduk miskin yang merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 564.230 orang. Angka ini lebih besar 33isbanding dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 yang hanya mencapai 560.880 orang. Klasifikasi Keluarga-keluarga di DIY, seperti yang tetera berikut ini :

- Pra sejahtera sebanyak 24,30%, yang dikategorikan sebagai
- Keluarga sejahtera I 21,52%,
- Keluarga sejahtera II tercatat 15,72% dan
- Sejahtera III 32,59%, dan
- Sejahtera plus 5,87% (DIY dalam Angka, 2012).

Data Rumah Tidak Layak Huni menurut Dinas PU-ESDM di DIY terdapat **91.200 RTLH** dan menurut data PPLS terdapat **58.413 RTLH**. Data RTLH signifikan dengan data penduduk miskin (data PPLS) di mana 90% dari penduduk miskin tinggal di RTLH, dengan variabel RTLH seperti yang telah dikemukakan

pada Data Rumah Tidak Layak Huni halaman 14. Adapun sebaran jumlah penduduk miskin di DIY seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel E. 2
Jumlah Penduduk Miskin dan Tidak Miskin di DIY

No	Kabupaten	Miskin	Tidak Miskin	Total
1	Kulon Progo	15.239	2.151	17.390
2	Bantul	7.247	674	7.921
3	Gunungkidul	25.809	2.380	28.189
4	Sleman	3.765	254	4.019
5	Jogyakarta	787	107	894
Total		52.847	5.566	58.413

Sumber :Data PPLS 2011diolah

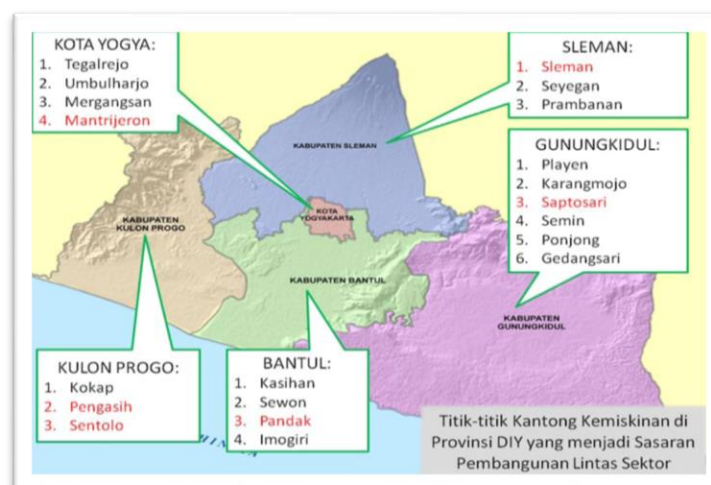
Tabel E. 3
Prosentase Penduduk Miskin dan Tidak Miskin di DIY

No	Kabupaten	% Miskin	% Tidak Miskin
1	Kulonprogo	87,63	12,37
2	Bantul	91,49	8,51
3	Gunungkidul	91,56	8,44
4	Sleman	93,68	6,32
5	Kota	88,03	11,97
Total		90,47	9,53

Sumber :Data PPLS 2011diolah

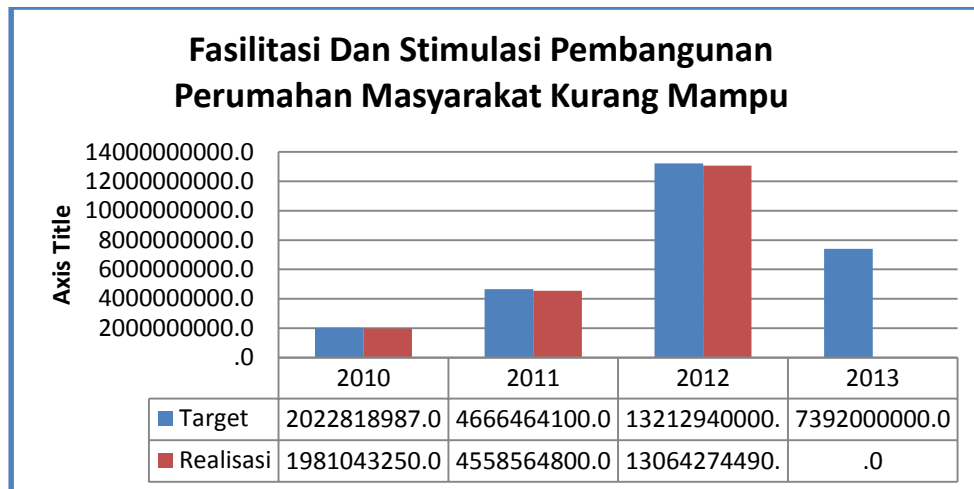
Jika ditinjau secara kewilayahan di DIY terdapat terdapat 16 kecamatan miskin di Kabupaten dan 4 kecamatan miskin di Kota secara spasial dapat ditunjukkan seperti peta berikut ini :

Gambar E. 1
Peta Sebaran Kecamatan Miskin di DIY



Jika dilihat dari alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Perumahan mengalami peningkatan cukup tinggi pada tahun 2012 dibanding tahun-tahun sebelumnya, dapat digambarkan seperti grafik berikut :

Gambar E. 2
Grafik Fasilitas dan Stimulasi pembangunan Perumahan Masyarakat kurang Mampu



Evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan dari Tahun 2010 – Th 2013

2010	2011	2012	2013 (on going)
Lokasi: Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul dan Kota Yogyakarta Total = 320 unit rumah	Lokasi: Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Yogyakarta 1. Kab. Gunungkidul: 200 rumah 2. Kab. Bantul: 120 rumah 3. Kab. Kulon Progo: 120 rumah 4. Kab. Sleman: 140 rumah 5. Kota Yogyakarta : 40 rumah Total = 620 unit rumah	Lokasi: Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo dan Kota Yogyakarta 1. Kab. Gunungkidul 468 unit rumah 2. Kab. Kulon Progo 140 unit rumah 3. Kab. Bantul 400 unit rumah 4. Kab. Sleman 416 unit rumah 5. Kota Yogyakarta 86 unit rumah. Total = 1.510 unit rumah	Lokasi: Kab Gunungkidul Kab. Sleman, Kab. Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo dan Kota Yogyakarta 1. Kab. Gunungkidul unit rumah 317 2. Kab. Kulon Progo 190 unit rumah 3. Kab. Bantul 323 unit rumah 4. Kab. Sleman 294 unit rumah 5. Kota Yogyakarta 110 unit rumah. Total = 1.234 unit rumah

Pada **Program Pengembangan Perumahan** dengan Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, terdapat peningkatan jumlah RTLH yang mendapat bantuan menjadi rumah layak huni (RLH) yaitu dari 320 rumah tahun 2010 meningkat menjadi 620 rumah pada tahun 2011 dan 1510 rumah pada tahun 2012 dan turun menjadi 1234 unit pada tahun 2013.

E.2 Masih adanya Permukiman Kumuh

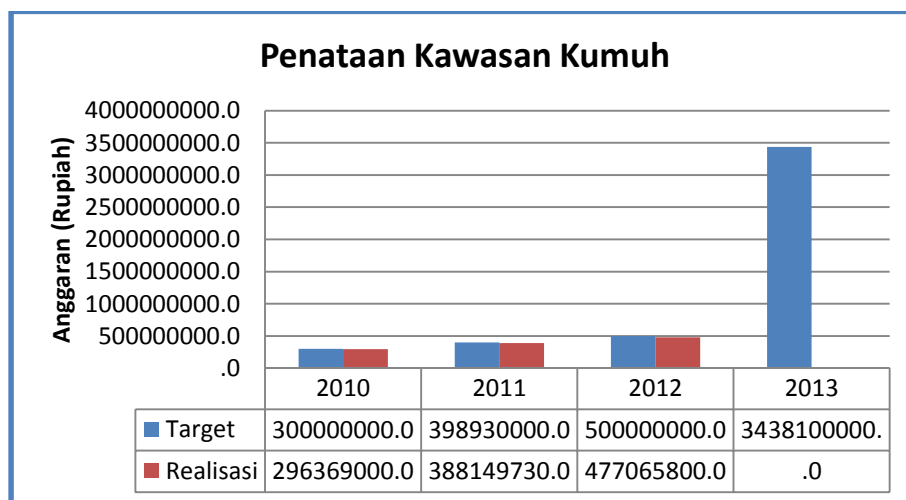
Berdasarkan data *Neighbourhood Urban Shelter Sector Project (NUSSP)* Tahun 2009 terdapat 107 lokasi kumuh pada 69 kawasan kumuh di daerah perkotaan yang sampai dengan Tahun 2012 telah ditangani 12 lokasi. Tolok ukur capaian kerja yang telah ditargetkan dilakukan melalui serangkaian kegiatan penataan kawasan padat penduduk yang cenderung kumuh. DIY termasuk dalam wilayah rawan bencana alam, yaitu letusan gunung api, tsunami, gempa, banjir, kekeringan, dan angin puting beliung. Kerawanan ini bila tidak diantisipasi akan berdampak pada kenaikan angka kemiskinan saat bencana terjadi. Apabila dikaitkan dengan Isu strategis RPJMD, yaitu :

1. Belum optimalnya Pengembangan sistem perumahan dan permukiman layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan
2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman
3. Pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh

Maka secara skala, permukiman kumuh dapat dilihat dari PSU sebab dengan PSU yang tidak layak maka akan muncul kekumuhan.

Pelaksanaan kegiatan di Tahun 2011 meliputi Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul, sedangkan tahun 2012 meliputi 5 kawasan dalam 3 kabupaten. Peningkatan anggaran mencapai 50%, namun terjadi sedikit penurunan capaian. Grafik berikut menunjukkan alokasi anggaran untuk penataan kawasan kumuh.

Gambar E. 3
Grafik Alokasi Anggaran Penataan Kawasan Kumuh

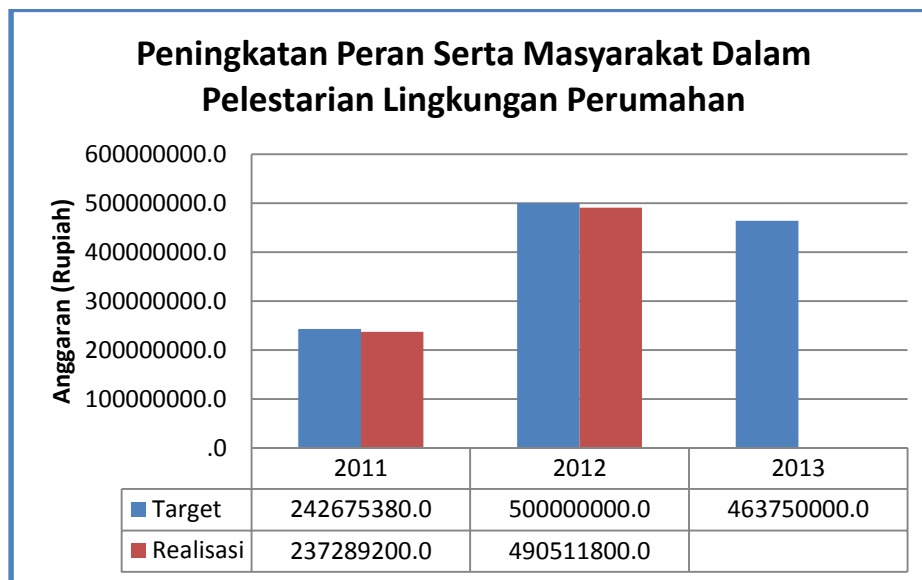


E.3 Evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan dari Tahun 2010 – Th 2012 :

Selain kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan, maka dalam Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pemukiman kumuh yaitu kegiatan Fasilitasi Penataan Kawasan Kumuh. Pada

Tahun 2010 hanya meliputi 1 kawasan, sedang pada tahun 2011 meliputi 3 kawasan, kemudian tahun 2012 meliputi 3 kawasan. Kedua kegiatan mempunyai besar anggaran yang sama. Namun, kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan mempunyai capaian yang lebih besar walaupun baru dilakukan tahun 2011. Hal ini dapat diasumsikan bahwa dari kegiatan tersebut ada unsur keberlanjutan yang dapat digali dari potensi lokal masing-masing kawasan atau kabupaten. Secara grafik alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan seperti yang terlihat dibawah ini :

Gambar E. 4
Grafik Alokasi Anggaran Peningkatan Peran Serta Masyarakat



Kategori penanganan untuk tahun 2013 dengan Program Penataan Kawasan Kumuh telah tepat sasaran karena mencakup area yang sangat kumuh dan jumlah dusun kategori kumuh yang lebih banyak dibanding kecamatan lain yang termasuk dalam data NUSSP 2006.

Dalam kasus Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul, bila diasumsikan bahwa mayoritas penduduk miskin tinggal di lingkungan kumuh, maka sesuai dengan data NUSSP 2006, namun untuk kabupaten lain yaitu Kulon Progo, Sleman, dan Bantul, hal tersebut menjadi kurang tepat. Namun berdasarkan data luasan kawasan kumuh, banyaknya penduduk miskin di suatu kecamatan tidak ada korelasinya dengan luasnya suatu kawasan kumuh. Dengan demikian pertimbangan mengenai penduduk miskin dan PSU, variabel penentunya adalah prioritas pada faktor ekonomi, sosial, lingkungan, atau budaya yang mendominasi di kawasan itu. Sebagai contoh, pekerjaan sesuai potensi budaya adalah bertani, maka ini akan diutamakan diikuti oleh variabel lain misalnya memiliki anak 2 – 3 dan rumah ditinggali oleh 1 kepala keluarga.

E.4 Kebutuhan rumah (baglog)

Pembangunan permukiman di Provinsi DIY diarahkan pada beberapa tujuan yaitu:

- a) sebagai pendukung peremajaan kota (*urban renewal*)

- b) diarahkan untuk rusunawa 40% sehingga perlu 107 twin block
- c) dokumen RP4D untuk kabupaten/kota
- d) perbaikan PSU non Kawasan

Seperti yang disampaikan dalam RPJMD DIY, kondisi permukiman dalam skala ruang kota DIY dibagi dalam empat kelompok yakni kelompok permukiman di kawasan cagar budaya, di kawasan kolonial, di bantaran Sungai Code dan Sungai Winongo serta permukiman di kawasan kampung kota.

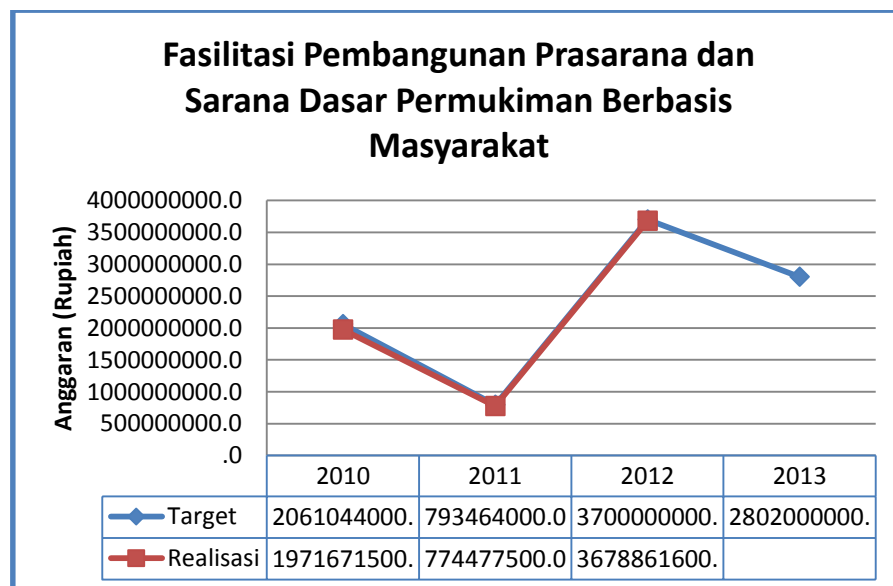
Kebijakan dalam Pemenuhan kebutuhan akan rumah pada kawasan yang padat penduduk adalah dengan dibangunnya rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) yang sampai saat ini sudah terbangun 8 lokasi di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul sebanyak 16 twin blok dengan kapasitas 1491 unit hunian dengan luas masing-masing hunian 21 m². Dimana hal tersebut adalah salah satu bentuk dari Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD yakni meningkatkan sarana dan Prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan. Disamping itu potensi SDM di Provinsi DIY cukup besar dengan jumlah penduduk mencapai 3.434.534 jiwa. Kepadatan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta, dengan komposisi tertinggi adalah usia 26 s/d 59 tahun (50,84 %) yang merupakan tenaga kerja produktif.

Backlog penyediaan hunian layak bagi MBR sesuai prediksi tahun 2014 memerlukan 86.000 unit dengan asumsi 30% tinggal di kota (atau 25.800 unit).

E.5 Evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan dari Tahun 2010 – Th 2012

Pada Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana Umum (PSU) Kawasan Perumahan Pedesaan mengalami penurunan anggaran. Pada periode tahun 2010, bencana erupsi mempengaruhi keberlanjutan kegiatan ini di tahun 2011. Pada 2010 terdapat 4 kawasan dengan target anggaran 900,000,000. Sedangkan tahun 2012 terdapat target anggaran 750,000,000.

Gambar E. 5
Grafik Alokasi Anggaran Fasilitas Pembangunan Sarpras Berbasis Masyarakat



Pada tahun 2010, Kegiatan pembangunan PSU meliputi 4 kabupaten, di tahun 2011 meliputi 3 kabupaten, dan di tahun 2012 meliputi 4 kabupaten dan kota.

Total alokasi anggaran Sektor Perumahan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi besaran alokasi anggaran antara lain tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan sebesar Rp 636.264.569,- selanjutnya dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami lonjakan yang tajam sebesar Rp 11.772.180.448,- dan dari tahun 2012 ke tahun 2013 ini mengalami peningkatan sebesar Rp 2.409.560.000,- .

Dibawah ini menunjukkan list dari program dan kegiatan untuk Sektor Perumahan PUP – ESDM DIY yang dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 atau tahun berjalan ini.

Tabel E. 4
Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perumahan di DIY (2011 – 2013)

TAHUN	KEGIATAN
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Review RP4D; • Identifikasi Data Perumahan Formal; • Sistem Informasi Perumahan • Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) • Stimulasi bahan perbaikan perumahan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Stimulasi bahan perbaikan rumah di Kab. Gunungkidul: 200 rumah 2. Stimulasi bahan perbaikan rumah di Kab. Bantul: 120 rumah 3. Stimulasi bahan perbaikan rumah di Kab. Kulon Progo: 120 rumah 4. Stimulasi bahan perbaikan rumah di Kab. Sleman: 140 rumah 5. Stimulasi bahan utk perbaikan rumah Kota Yogyakarta : 40 rumah • Kajian pembangunan rumah sederhana sehat KPR bersubsidi di DIY • Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan • Bantuan Bahan Bangunan untuk perbaikan PSU : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan bahan bangunan utk perbaikan PSU Kab. Gunungkidul (Kec. Playen & Semanu): 1 paket 2. Bantuan bahan bangunan utk perbaikan PSU Kab. Bantul (Kec. Imogiri, Pundong & Piyungan): 2 paket 3. Bantuan bahan bangunan utk perbaikan PSU Kab. Sleman (Kec. Cangkringan, gamping, Tempel & Ngaglik): 3 paket • Pelaksanaan penetrasi jalan dan sand sheet Konstruksi Peningkatan Kualitas PSU Lingkungan Perumahan Perdesaaan (1. Desa Selang, Wonosari, Kab. Gunungkidul: 1 kwsn, 2. Dusun Madugondo, Sitimulyo, Piyungan, Kab. Bantul: 1 kwsn) • Pematangan/Penyiapan lahan siap bangun untuk relokasi akibat erupsi Merapi: 18 Ha • Penataan kawasan padat penduduk dan kumuh <ol style="list-style-type: none"> 1. PSU Kota Wonosari, Kab. Gunungkidul: 1 lokasi 2. PSU Kawasan jembatan Sarjito 2 Kab. Sleman: 1 lokasi 3. PSU Kota Wates Kab. Kulon Progo: 1 lokasi
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Naskah Akademis RP4D • Fasilitasi penyusunan peraturan perundangan RP4D

<p>2013 (Posisi KUA – PPAS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stimulasi bahan bangunan untuk Rumah tidak layak huni di Provinsi DIY (1500 rumah) • Fasilitasi updating data PKP se DIY • Penilaian Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan (PKLSP) • Peningkatan kualitas Prasarana Sarana Umum (PSU) Lingkungan Perumahan Perdesaan (4 lokasi) • Perencanaan Peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan perdesaan (4 lokasi) • Pengawas peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan perdesaan (4 lokasi) • Pembangunan prasarana dan sarana permukiman berbasis masyarakat • Peningkatan kualitas Prasarana Umum (PSU) lingkungan perumahan 5 kawasan tersebar di 3 kabupaten • Perencanaan Peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan (3 kabupaten) • Pengawas peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan (3 kabupaten) • Identifikasi prasarana dan sarana kawasan kumuh • Identifikasi kebutuhan areal pemakaman di Kartomantul Provinsi DI Yogyakarta • Peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan • Perencanaan Peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan • Pengawasan Peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Pemanfaatan pembangunan rusunawa termasuk Kampung vertikal 2. Buku Kompilasi data dan pengembangan perumahan dan permukiman 3. Kajian indek keterjangkauan pemilikan rumah bagi MBR di DIY 4. Identifikasi Perumahan Swadaya • Kajian norma, standar, dan manual dan manual (NSPM) bantuan stimulan rumah tidak layak huni (RTLH) • Stimulan bahan baku bangunan untuk rehab.rumah (460 rumah di Imogiri, Kasihan, Playen, Ponjong, Kalibawang, Sentolo, Prambanan, Seyegan) • Penilaian Adi Upaya Puritama, Pembaharuan data PKP, Monev Peranserta masyarakat dalam penciptaan lingkungan sehat perumahan (3 paket) • Peningkatan Prasarana Sarana & Utilitas (PSU) kawasan perumahan (4 Kab/Kota) • Bantuan stimulan bahan bangunan untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman (20 lokasi di 4 Kabupaten) • Peningkatan kualitas PSU (5 kawasan yaitu Bantul, Semanu, Kotagede, Kalibawang, Berbah) • Penataan kawasan kumuh (40 lokasi di 4 Kabupaten)
---	--

Selanjutnya dari posisi KUA PPAS 2013 sampai menjadi APBD 2013, alokasi anggaran untuk Sektor Perumahan yang secara khusus ada di Dinas PUP-ESDM DIY adalah sebagai berikut :

Tabel E. 5
Alokasi Anggaran Sektor Perumahan di Dinas PUP ESDM DIY 2013

Uraian Program/Kegiatan	Pagu Dana
Program Pengembangan Perumahan	Rp 550.000.000,-
A. Penetapan Kebijakan, strategi dan Program Perumahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Kajian Pembangunan Rusunawa termasuk Kampung Vertikal. 2. Terlaksananya Identifikasi Indeks Keterjangkauan Rumah Bagi MBR di DIY. 3. Terlaksananya Kajian Kawasan Piyungan untuk MBR. 4. Terlaksananya Kajian Kawasan Sentolo untuk Perumahan MBR. 5. Terlaksananya Kajian Kebutuhan PSU Perdesaan di lingkungan perumahan di DIY (15 lokasi). 6. Terlaksananya Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni (15 Lokasi) 	
B. Penyusunan Norma, Standar , Pedoman dan Manual (NSPM) <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dokumen Norma Standar Prosedur dan Manual (NSPM) bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): 1 dokumen 	Rp 100.000.000,-
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 150.000.000,-
A. Koordinasi pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Penilaian Adiupaya Puritama : 4 Kegiatan dan 1 periode tahunan. 2. Terlaksananya Pembaharuan Data PKP 3. Terlaksananya Penilaian Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan (PKLSP) 4. Terlaksananya Peringatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS)& Hari Habitat Dunia. 5. Rapat Koordinasi dng pemerintah pusat, dan pemangku kebijakan 	

Sumber :Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD TA 2013 PUPESDM, diolah

Berdasarkan tabel diatas di Daerah Istimewa Yogyakarta penanganan permasalahan sektor perumahan juga di breakdown penanganan pada wilayah Kabupaten/Kota. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini yang merupakan **APBD SKPD PU ESDM DIY, Sektor Perumahan 2013 yang dialokasikan ke Kabupaten dan Kota di DIY** dan telah melalui proses pembahasan dan persetujuan DPRD DIY, alokasi anggaran berkembang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan prioritas penanganan khususnya pengentasan kemiskinan melalui penanganan RTLH.

Tabel E. 6

Alokasi Anggaran Perumahan 2013 untuk Kabupaten Gunungkidul

Uraian Program/Kegiatan	Pagu Dana
Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Pengadaan bahan bangunan untuk perbaikan rumah 317 unit rumah (15 Kecamatan)	Rp 1.854.000.000,-
Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan fasilitas prasarana dan sarana d utilitas kawasan Perumahan - Peningkatan kualitas PSU (5 Kecamatan, Gedangsari, Ponjong, Wonosari, Paliyan)	Rp 438.675.000,-
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pembangunan PSD Permukiman berbasis masyarakat - Stimulan bahan bangunan untuk kelompok masyarakat/PSU di (20 kelompok) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan - Peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan perdesaan dilokasi Ngeposari Semanu	Rp 732.500.000,-
Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh Penataan Kawasan Kumuh Peningkatan kualitas PSU Kawasan Kumuh di 9 lokasi (5 Kecamatan : Wonosari, Semin, Ponjong, Karangmojo, Playen)	Rp 92.750.000,- Rp 819.000.000,

Tabel E.7

Alokasi Anggaran Perumahan 2013 untuk Kabupaten Kulon Progo

Uraian Program/Kegiatan	Pagu Dana
Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Pengadaan bahan bangunan untuk perbaikan rumah 190 unit rumah (12 Kecamatan)	Rp 1.152.000.000,-
Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan fasilitas prasarana dan sarana d utilitas kawasan Perumahan - Peningkatan kualitas PSU (4 Kecamatan : Samigaluh, Lendah, Kokap, Panjatan)	Rp 350.940.000,-
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pembangunan PSD Permukiman berbasis masyarakat - Stimulan bahan bangunan untuk kelompok masyarakat/PSU di (7 kelompok) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan - Peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan	Rp 255.000.000,- Rp 92.750.000,-

perdesaan dilokasi Kec. Kalibawang Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh Penataan Kawasan Kumuh Peningkatan kualitas PSU Kawasan Kumuh di 6 lokasi (Kecamatan : Wates, Galur, Pengasih, Temon)	Rp 569.700.000,-
---	-------------------------

Tabel E. 8
Alokasi Anggaran Perumahan 2013 untuk Kabupaten Bantul

Uraian Program/Kegiatan	Pagu Dana
Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Pengadaan bahan bangunan untuk perbaikan rumah 323 unit rumah (13 Kecamatan)	Rp 1.962.000.000,-
Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan fasilitas prasarana dan sarana d utilitas kawasan Perumahan - Peningkatan kualitas PSU (6 Kecamatan : imogiri, Bantul, Dlingo, Kasihan, Bambanglipuro, Sewon)	Rp 526.410.000,-
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pembangunan PSD Permukiman berbasis masyarakat - Stimulan bahan bangunan untuk kelompok masyarakat/PSU di (30 kelompok) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan - Peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan perdesaan dilokasi dukuh Sabdodadi dan Balonglor Banguntapan	Rp 1.120.000.000,- Rp 185.500.000,-
Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh Penataan Kawasan Kumuh Peningkatan kualitas PSU Kawasan Kumuh di 10 lokasi (Kecamatan : Piyungan, Plered, Dlingo, Imogiri, Jetis, Bantul, Kasihan, Pandak)	Rp 819.000.000,-

Tabel E. 9
Alokasi Anggaran Perumahan 2013 untuk Kabupaten Sleman

Uraian Program/Kegiatan	Pagu Dana
Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Pengadaan bahan bangunan untuk perbaikan rumah 294 unit rumah (14 Kecamatan)	Rp 1.764.000.00,-
Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan fasilitas prasarana dan sarana d utilitas kawasan Perumahan - Peningkatan kualitas PSU (4 kecamatan : Prambanan, Depok, Seyegan, Sleman) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp 438.675.000,-

F STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKTOR PERUMAHAN DI DIY



Berbagai perkembangan, isu-isu strategis dan permasalahan perumahan seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya tidak terlepas dari dinamika dan kemajemukan perubahan-perubahan di dalam pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan lingkungan, yang tidak saja mengikuti perubahan berdimensi ruang dan waktu, tetapi juga

perubahan kondisi khususnya bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemampuan pengendalian pembangunan perumahan di Pemda DIY yang masih relatif terbatas serta kewenangan pengaturan Pemerintah Provinsi yang dibatasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan mulai munculnya peran dan potensi masyarakat di dalam mengatur dan melaksanakan sendiri kebutuhannya akan perumahan dan permukiman, juga sangat mendasari kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan. Rumusan kebijakan dan strategi diharapkan implementasinya dapat mendorong pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan, serta telah mengadopsi dan melaksanakan pendekatan lintas sektoral.

Sesuai dengan Misi 4 RPJMD DIY 2013 – 2017 yaitu memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Strategi yang ditempuh terkait Pembangunan di Sektor Perumahan :

1. Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dengan menitikberatkan pada nilai budaya dan fungsi ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. **Peningkatan ekonomi daerah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar melalui penyelenggaraan pelayanan infrastruktur, penyediaan serta pengembangan energi dan sumberdaya mineral**
3. Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan
4. Pengembangan pelayanan Komunikasi dan Informatika berbasis Citizen centris
5. Peningkatan kualitas perencanaan yang visioner dan implementatif

Arah kebijakan terkait dengan sektor Perumahan :

1. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berupa pusat-pusat permukiman dan system jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di luar kawasan perkotaan dan kawasan utara
2. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

- transportasi, keciptakarya, Sumber Daya Air, perumahan dan permukiman serta penyediaan dan pengembangan energy sumberdaya mineral
3. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan minimal infrastruktur perkotaan (air limbah, drainase, Persampahan) melalui penyediaan database, optimalisasi system, pemantapan kelembagaan pengelola, dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta kerjasama dengan swasta
 4. Mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan infrastruktur dasar, utamanya bagi warga miskin melalui penyediaan hunian yang layak berikut sarana dan prasarana dasar pendukungnya
 5. Mensinergikan kebijakan dan mengkolaborasikan kelembagaan dalam upaya debottlenecking pemenuhan kebutuhan perumahan (Keterjangkauan, Kelembagaan dan ketersediaan lahan)
 6. Melaksanakan revitalisasi/peremajaan kawasan perumahan dan permukiman
 7. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak terkait dalam pemenuhan penyediaan perumahan.
 8. Meningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan

Kebijakan akselerasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan papan bagi MBR di Provinsi DIY mengacu pada beberapa peraturan dan perundangan yang berlaku , antara lain :

- UUD 1945
- UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU No.20/2011 tentang Rumah Susun
- UU No.17/2007 tentang RPJMN 2005-2025
- Perda RPJP dan RPJM Provinsi DIY
- Draft RP4D Provinsi DIY

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mengakselarsi program dan kegiatan di Sektor Perumahan adalah sebagai berikut :

- a. Mensinergikan kebijakan dan mengkolaborasikan kelembagaan dalam upaya debottlenecking pemenuhan kebutuhan papan (keterjangkauan,kelembangaan, dan ketersediaan lahan).
- b. Pengurangan jumlah backlog perumahan.
- c. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan perumahan.
- d. Pelaksanaan revitalisasi/peremajaan kawasan permukiman/perumahan.
- e. Pemberdayaan komunitas-komunitas perumahan.
- f. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana utilitas umum lingkungan perumahan.
- g. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan pihak- pihak terkait dalam pemenuhan penyediaan perumahan.
- h. Melakukan indentifikasi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang membutuhkan pemenuhan sesuai dengan skala prioritas penanganan dan ketepatan sasaran penerima manfaat program penanganan.
- i. Melakukan pemetaan kapasitas dan pembagian peran kelembagaan dalam pelaksanaan program pembangunan permukiman.

- j. Melakukan kajian evaluasi terhadap program penanganan kebutuhan papan bagi MBR yang selama ini dilakukan.
- k. Melakukan kajian tentang sistim pembiayaan inovatif dalam upaya akselerasi pemenuhan kebutuhan papan bagi MBR.
- l. Melakukan kajian tentang penyediaan lahan bagi perumahan MBR melalui kerjasama antar daerah.

Sesuai dengan RPJMD DIY 2013-2017 Indikasi rencana program prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam rnenyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Khususnya untuk sektor Perumahan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan adalah sebagai berikut :

Tabel F.1 Indikator, Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penangung Jawab
			Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Urusan Wajib															
Perumahan															
Program Pengurangan Kawasan Kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin	23,20%	29%	6.050.000	34%	4.015.000	40%	4.396.000	46%	4.596.000	51%	4.998.000	51%	4.998.000	PUPESDM
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas	38,58%	44%	4.100.000	49%	2.750.000	54%	3.025.000	59%	3.327.000	64%	3.660.000	64%	3.660.000	PUPESDM
Program Pengembangan Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	8,50%	8,00%	11.362.500	7,5%	7.500.000	7%	7.500.000	6,50%	7.500.000	6%	7.500.000	6%	7.500.000	PUPESDM

Sumber : RPJMD DIY, Tahun 2012-2017

G REKOMENDASI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR PERUMAHAN DI DIY TAHUN 2014

Program dan Kegiatan yang disusun untuk Tahun 2014 dilakukan atas dasar evaluasi program dan kegiatan bidang perumahan tahun-tahun sebelumnya serta dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan prioritas yang harus ditangani di sektor Perumahan di DIY.

Penetapan Program Perumahan untuk Provinsi DIY Tahun 2014 yang didanai oleh APBD dilakukan atas dasar penetapan Program yang telah disampaikan pada RPJMD DIY tahun 2013 - 2017, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengurangan Kawasan Kumuh
2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
3. Program Pengembangan Perumahan

Rekomendasi

Selanjutnya rekomendasi usulan kegiatan di Sektor Perumahan untuk tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. Tantangan pembangunan perumahan dan permukiman akan bergerak kearah daerah perkotaan seiring dengan fakta penduduk perkotaan yang semakin meningkat. Oleh karenanya perlu perhatian lebih besar terhadap pembangunan perumahan di perkotaan antara lain melalui peremajaan kota dan pembangunan rumah susun (baik rusunawa maupun rusunami) dalam rangka menghadapi kelangkaan lahan di perkotaan untuk perumahan.
2. Dalam rangka meningkatkan standar dan kualitas perumahan dan permukiman yang layak perlu dibangun kebijakan standarisasi perumahan dan prasarana pendukungnya. Untuk mendukung kebijakan tersebut perlu dibangun suatu sistem pendataan perumahan yang handal.
3. Pelaksanaan pembangunan perumahan perlu didukung dengan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, berkelanjutan dan terjangkau. Oleh karenanya perlu dukungan sumber pembiayaan yang dapat digunakan misalnya sinergi dengan bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan dan didukung permodalan baik untuk kredit konstruksi maupun kredit pemilikan rumah.
4. Pembangunan perumahan merupakan pembangunan multisektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya harus ada koordinasi dan kerjasama baik di pusat maupun daerah sehingga semua permasalahan yang ada dapat diatasi secara bersama. Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten dan Kota memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan perumahan dan permukiman karena urusan perumahan sudah menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten dan Kota dan dalam rangka lebih mendorong peran tersebut perlu membangun koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat-tingkat pemerintah, maupun antar tingkatan pemerintah, maupun kerjasama pemerintah dan swasta.
5. Perlu dilakukan reformasi dibidang pertanahan dan implementasi tata ruang yaitu pengendalian tata ruang guna untuk mengatasi kendala-kendala pengadaan lahan untuk pembangunan

perumahan khususnya bagi MBR dan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan perumahan dan permukiman di masa mendatang Pemda DIY perlu melakukan langkah terobosan dalam pengadaan lahan misalnya melalui *land banking* dengan kriteria lahan yang tidak produktif melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menjawab kebutuhan akan rumah bagi warga berpenghasilan rendah.

6. Dalam rangka penyediaan rumah bagi MBR dapat dilakukan alternatif kerjasama dengan pengembang untuk menyediakan luasan tertentu dari keseluruhan lahan bagi perumahan MBR sesuai dengan konteks ekonomi, sosial, lingkungan (*environment*), dan budaya target penghuni .
7. Penegasan mengenai kebijakan perumahan khususnya bagi pengembang swasta untuk menyediakan perumahan MBR dengan perbandingan tertentu sesuai dengan kebijakan Kementrian Perumahan Rakyat (3:2:1) serta pemberian insentif bagi permohonan pembangunan perumahan-perumahan sederhana bagi MBR.
8. Pemilihan program dan kegiatan diharapkan memiliki daya ungkit (*leverage*) yang besar yang dapat berpengaruh terhadap kinerja program lain. Dalam hal ini perbaikan RTLH akan bersinergi dengan perbaikan permukiman kumuh, dengan mempertimbangkan faktor klaster atau kelompok dalam bentuk lingkungan sekitar (*neighborhood*), potensi lingkungan SDA (*environment*), dan kemampuan penduduk (SDM).
9. Untuk Permukiman Kumuh perlu dilakukan pendataan dan sinkronisasi kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi DIY dan NSPM permukiman kumuh. Permukiman kumuh berarti meliputi unsur luasan atau besaran, serta kepadatan. Sehingga pendekatan lokasi yang paling sesuai adalah lokasi di kota dan di pinggir sungai. NSPM Kawasan Kumuh harus mendapat fasilitasi legalisasi NSPM Kawasan Kumuh (misalnya dengan Peraturan Gubernur).
10. Alokasi anggaran program dan kegiatan di Sektor Perumahan khususnya untuk indikator pengurangan RTLH perlu dicantumkan besaran pendanaan karena 90 % pembiayaan diluar APBD DIY, sehingga kita bisa melihat kapasitas fiskal untuk anggaran yang sedang berjalan.
11. Adanya urgensi penggunaan data yang sama bagi seluruh *stake holder* (Pusat, Pemda DIY, Kabupaten/Kota dan Instansi Sektorial seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PU ESDM dll) maka diperlukansatu dokumen memorandum program untuk penyelesaian RTLH dengan target penanganan pertahunnya lengkap dengan sharing anggaran masing-masing *stake holder*.
12. Perlunya Pemberdayaan komunitas-komunitas perumahan secara berkelanjutan agar komunitas nantinya dapat secara mandiri menyelesaikan permasalahan lingkungannya.

Hasil dari Forum SKPD (seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini) yang merupakan salah satu tahapan dalam rangka perencanaan pembangunan 2014 yang didalamnya membahas rancangan renja SKPD. Forum SKPD bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan , menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Diharapkan dari proses forum SKPD akan menghasilkan perencanaan yang lebih berkualitas bagi pembangunan DIY. Selanjutnya hasil dari diskusi dan masukan seluruh stakeholder dalam Forum SKPD di update dalam sistem perencanaan pembangunan berbasis web yang disebut dengan Jogja Plan.

Tabel G. 2

Usulan Program dan Kegiatan Sektor Perumahan APBD DIY 2014

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2014		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1.04.1.03.01.15	Program Pengembangan Perumahan				
1.04.1.03.01.15.001	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun (RPJMD)	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	6 dokumen	Rp 350.000.000,00
1.04.1.03.01.15.002	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun (RPJMD)	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	1 dokumen	Rp 100.000.000,00
1.04.1.03.01.15.006	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun (RPJMD)	- Banguntapan - Imogiri - Kasihan - Sewon - Gedang sari - Karangmojo - Playen - Ponjong - Semanu - Semin - Gedongtengen - Mergangsan - Tegalrejo - Umbulharjo	800 rumah	Rp 7.000.000.000,00

Laporan Perencanaan Pembangunan Perumahan

			<ul style="list-style-type: none"> - Kalibawang - Kokap - Samigaluh - Gamping - Prambanan - Seyegan 		
1.04.1.03.01.15.008	Monitoring dan Evaluasi program pusat di Daerah	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun (RPJMD)	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	1 dokumen	Rp 50.000.000,00
1.04.1.03.01.22	Program Pengurangan Kawasan Kumuh				Rp 3.600.000.000,00
1.04.1.03.01.22.001	Penataan Kawasan Kumuh	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin (RPJMD)	<ul style="list-style-type: none"> - Imogiri - Karangmojo - Ponjong - Mergangsan - Samigaluh - Prambanan 	6 kawasan	Rp 3.600.000.000,00
1.04.1.03.01.23	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				Rp 2.350.000.000,00
1.04.1.03.01.23.001	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas (RPJMD)	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	4 dokumen	Rp 150.000.000,00
1.04.1.03.01.23.002	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Perumahan Perdesaan	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas (RPJMD)	<ul style="list-style-type: none"> - Kasihan - Gedang sari - Semanu - Umbulharjo - Kalibawang - Kokap - Gamping 	7 komunitas	Rp 700.000.000,00
1.04.1.03.01.23.003	Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas (RPJMD)	<ul style="list-style-type: none"> - Imogiri, Kasihan - Sewon, Gedang sari, - Playen, Semanu - Semin, Tegalrejo - Umbulharjo, - Kalibawang, Kokap - Samigaluh, Gamping - Prambanan, Seyegan 	15 lokasi	Rp 1.500.000.000,00

Sumber : Jogja Plan

Catatan Kritis Usulan Kegiatan Sektor Perumahan tahun 2014 sebagai bahan rekomendasi untuk KUA PPAS adalah sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Perumahan** yang meliputi tiga kegiatan yang antara lain penyusunan kajian (6 dokumen) pada 2014 ini perlu menindaklanjuti dengan kegiatan yang sifatnya menerus dari kegiatan pada tahun 2013 agar terjadi *sustainability* misalnya kajian kampung vertikal di tahun 2013 dapat dilakukan kegiatan penyusunan DED pada 2014, diikuti dengan sosialisasi kajian yang dimaksudkan untuk memberikan informasi pada masyarakat setiap kajian kebijakan agar mendapat dukungan dari masyarakat. Sebaiknya Kajian tentang kampung vertikal juga dikaitkan dengan penataan kawasan kumuh yang lebih humanis karena keterbatasan lahan diperkotaan, seharusnya juga dilengkapi dengan *public area* termasuk didalamnya penyediaan fasos dan fasum bagi para penghuni nya untuk bersosialisasi.
2. Untuk kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dengan target prioritas pada kecamatan miskin dalam rangka mendukung pengurangan angka kemiskinan di DIY perlu lebih diperjelas alokasi penanganan RTLH masing-masing kecamatan miskin, serta perlunya data alokasi anggaran penanganan RTLH di masing-masing Kabupaten dan Kota bersumber dari Kemenpera agar penanganan RTLH dapat terpadu.
3. **Program Penanganan Kawasan Kumuh** yang pada tahun 2014 ini meliputi 6 kawasan , sebaiknya untuk Permukiman Kumuh perlu dilakukan pendataan dan sinkronisasi kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi DIY dan NSPM pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh berarti meliputi unsur luasan atau besaran, serta kepadatan. Sehingga pendekatan lokasi yang paling sesuai adalah lokasi di kota dan di pinggir sungai. NSPM Kawasan Kumuh harus mendapat fasilitasi legalisasi NSPM Kawasan Kumuh (misalnya dengan Peraturan Gubernur), dan diperlukan *mapping* kawasan kumuh agar kegiatan penanganan dapat dilaksanakan lebih fokus dan terarah. Selanjutnya Penanganan Kawasan kumuh dapat dilakukan melalui tiga model antara lain sederhana , advance dan model *mixuse* misalnya dengan pembangunan rusunawa.
4. Terkait dengan usulan Rusunawa diharapkan fisik sudah akan dibangun di tahun 2014 sehingga diperlukan kajian identifikasi lokasi serta model pengelolaannya agar kemanfaatannya maksimal sehingga diperlukan koordinasi dengan SKPD Tenaga Kerja terkait dengan rencana penyediaan rusunawa untuk tenaga kerja (dalam arti yang akan difasilitasi tenaga kerja seperti apa spesifikasinya?). Usulan rusunawa untuk naker karena sifatnya mendesak bisa dianggarkan melalui Anggaran Perubahan tahun 2013 ini.

5. Masukan dari Kemenpera untuk Pemda DIY menyediakan *land banking* dan rusunawa, mungkin usulan kegiatan belum fisik tetapi dapat dimulai dari identifikasi lokasi terlebih dahulu, sehingga Perlu langkah support untuk *land banking*, penggunaan modul rusunawa jika sulit diterapkan karena ketersediaan luasan lahan yang sulit dapat menggunakan modul yang baru yaitu rusunawa mini.
6. **Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan**, untuk Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan Peran dan fungsi Pemda dalam hal ini Pemda DIY perlu diperkuat dan didorong melalui mekanisme koordinasi yang lebih intens baik dengan Pemerintah Pusat maupun Kabupaten terkait dengan alokasi anggaran Kemenpera di daerah.
7. Selanjutnya diperlukan Pemberdayaan komunitas-komunitas perumahan secara berkelanjutan dan pendampingan untuk rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membangun kesadaran bersama agar komunitas nantinya dapat secara mandiri menyelesaikan permasalahan lingkungannya.

H KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERUMAHAN

H.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi DIY yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan. Nilai PDRB DIY dengan harga konstan 2000 pada tahun 2011 adalah sebesar Rp22,129 trilyun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16% dari tahun sebelumnya, sedangkan proyeksi PDRB tahun 2012 diperkirakan masing-masing mencapai kisaran Rp22,238 trilyun - Rp23,362 trilyun. PDRB DIY diprediksikan mengalami kenaikan terus menerus sampai tahun 2014 dengan kisaran proyeksi PRDB pada 2013 dan 2014 adalah Rp24,444 trilyun-Rp24,600 trilyun dan Rp25,740 trilyun-Rp25,978 trilyun. Sementara itu prediksinya pada tahun 2015 berkisar antara Rp27,130 trilyun sampai Rp27,459 trilyun.

Selama tahun 2011, peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor perdagangan dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor konstruksi, sektor listrik gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor penggalian. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran mempunyai kontribusi lebih dari seperlima PDRB, sementara itu dua sektor terkecil yaitu listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi di bawah satu persen dari PDRB.

Tabel H.1

**Kontribusi PDRB Sektoral Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha
(Harga Konstan 2000), 2011 – 2015 (%)**

Lapangan Usaha	2011	2012*	2013*	2014*	2015*
1. Pertanian	17,00	16,23	16,04	15,82	15,54
2. Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,68	0,65	0,63	0,62
3. Industri Pengolahan	13,31	13,34	13,37	13,37	13,32
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,90	0,92	0,91	0,91	0,91
5. Konstruksi	9,75	9,86	9,90	10,02	10,10

6. Perdagangan, Hotel & Restoran	20,82	21,02	21,08	21,15	21,35
7. Transportasi dan Komunikasi	10,70	10,87	10,99	11,02	11,02
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	9,80	9,91	10,01	10,05	10,07
9. Jasa-jasa	17,07	17,17	17,06	17,05	17,07
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: * adalah angka proyeksi

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018

Pola struktur PDRB DIY pada tahun 2011 diproyeksikan akan terus berlanjut di masa mendatang sampai tahun 2015 mengingat perekonomian DIY masih bertumpu pada jasa pendidikan, pariwisata dan budaya. Kegiatan ekonomi di sektor tersebut menciptakan permintaan di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terus tinggi. Sementara itu, sektor perdagangan DIY pada beberapa tahun mendatang akan didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor karena beberapa hal berikut: a) Proses pemulihan krisis ekonomi global yang terus berlanjut mendorong geliat ekonomi pasar global yang menjadi tujuan ekspor produk-produk DIY; b) Permintaan ekspor yang terus meningkat dan diharapkan mampu mendorong investasi jangka panjang dan; c) Proyeksi kinerja ekonomi nasional untuk satu dasawarsa mendatang berada pada tren meningkat dengan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi dan pembentukan modal kerja (investasi) pada momentum era golden age angkatan kerja Indonesia.

Pertumbuhan sektor pertanian yang lambat harus menjadi salah satu fokus perhatian khusus di DIY mengingat pangsa tenaga kerja yang bergerak di sektor tersebut masih sangat besar. Pertumbuhan output sektor pertanian yang lambat dan masih tingginya jumlah tenaga kerja pertanian menyebabkan pendapatan per kapita di sektor ini tetap rendah. Rendahnya pendapatan per kapita di sektor ini dapat menjadi penghalang bagi tenaga kerja yang masih produktif dan muda untuk bergerak di sektor pertanian.

Secara makro regional kondisi internal domestik DIY yang mendukung terciptanya suasana optimis dalam proyeksi makro ekonomi Provinsi DIY adalah misi dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan good governance sebagai misi utama seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-nya. Perpaduan dari kedua faktor eksternal dan internal inilah yang diyakini akan membuat lompatan perbaikan iklim investasi sebagai penopang perekonomian makro DIY dalam satu dasawarsa mendatang.

H.2 Pendanaan Pembangunan Sektor Perumahan

Alokasi besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan sektor Perumahan dalam memenuhi target RPJMD dapat terbagi dari berbagai sumber pendanaan ; APBN, APBD DIY, APBD kabupaten/kota, dan sumber-sumber lain yang berasal dari swasta, hibah, dll.

Keterbatasan sumber pendanaan dari APBD DIY dapat terlihat berdasarkan APBD DIY yang digunakan untuk mendanai pembangunan sektor Perumahan pada tahun 2012 dan 2013.

Tabel H. 2
Pagu APBD DIY tahun 2012-2013 untuk Program-Program Perumahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	APBD 2012	APBD 2013
		Anggaran	
1.04.1.03.01.00.15	Program Pengembangan Perumahan	Rp 13402940000	Rp 11.362.500.000
1.04.1.03.01.00.16	Program lingkungan Sehat Perumahan	Rp 9000000000	Rp 2.050.000.000
1.04.1.03.01.00.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp 4200000000	Rp 4.100.000.000
1.04.1.03.01.00.21	Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh	Rp 500.000.000	Rp 4.000.000.000
Jumlah		Rp19.002.940.000	Rp 21.512.500.000

Meskipun terdapat peningkatan pagu pada tahun 2013 sekitar 2,409 M namun jika dilihat dari pendanaan untuk tiap-tiap program akan terlihat dengan jelas minimnya dukungan APBD DIY bagi pembangunan sektor Perumahan, fokus belanja untuk pembangunan sektor Perumahan lebih diarahkan kepada pengembangan perumahan khususnya pada kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat yang tidak mampu dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan dan Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh untuk tujuan yang sama. Dengan kondisi seperti ini, maka sinergitas pendanaan dari berbagai sumber lain (APBN, APBD kabupaten/kota, dll) menjadi penting dalam pemenuhan target indikator RPJMD.

Berdasarkan KUA-PPA APBD 2014 yang telah disusun, alokasi pendanaan pembangunan sektor Perumahan mengalami penurunan yang cukup berarti (mencapai 8, 062 Milyar) dari tahun sebelumnya seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel H. 3
Pagu KUA PPA Tahun 2014 untuk Program-Program Perumahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	KUA PPA 2014
01.04.01.5.2.15	Program Pengembangan Perumahan	Rp 7.500.000.000
01.04.01.5.2.22	Program Pengurangan Kawasan Kumuh	Rp 3.600.000.000
01.04.01.5.2.23	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp 2.350.000.000
Jumlah		Rp 13.450.000.000

Alokasi anggaran di sektor Perumahan mengalami penurunan hal ini disebabkan karena kapasitas fiskal Pemda DIY yang rendah (kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penjumlahan dari PAD ditambah dengan dana bagi hasil baik pajak maupun bukan pajak) oleh karena itu sangat diperlukan peningkatan dukungan sumber pendanaan lain misalnya yang bersumber dari APBN, maupun program CSR dari perusahaan multinasional. Oleh karenanya alokasi anggaran program dan kegiatan di Sektor Perumahan khususnya untuk indikator pengurangan RTLH perlu dicantumkan besaran pendanaan karena 90 % pembiayaan diluar APBD DIY, sehingga kita bisa melihat kapasitas fiskal untuk anggaran yang sedang berjalan.

Pencermatan terhadap output dari masing-masing program akan menjadi penting dalam rangka mendapatkan “output gap” bagi pemenuhan target indikator RPJMD. Rincian kegiatan dan tolok ukur kinerja dari masing-masing program dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel H.4
Program, Kegiatan, dan Tolok Ukur Kinerja Sektor Perumahan pada KUA PPA 2014

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja
1	Program Pengembangan Perumahan	
	Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan	Terlaksananya : 1. Identifikasi Lahan Perkotaan Yogyakarta untuk Pembangunan Rusun 2. Penyusunan model Tabungan Perumahan Bagi MBR 3. Kajian Bantuan Perumahan untuk PNS 4. Identifikasi Kebutuhan PSU di DIY
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	Terlaksananya Penyusunan NSPM Pembangunan Perumahan untuk MBR
	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu	1. Terlaksananya bantuan stimulan bahan bangunan untuk perbaikan rumah tidak layak huni 2. Dokumen Laporan
	Monitoring dan Evaluasi Program Pusat di Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Pusat
2.	Program Pengurangan Kawasan Kumuh	
	Penataan Kawasan Kumuh	Terlaksananya peningkatan kualitas PSU pada Lingkungan Kumuh
3.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	
	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	Terlaksananya : 1. Penilaian Adiupaya Puritama 2. Pembaharuan Data PKP 3. Penilaian Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan (PKLSP) 4. Peringatan Hari Perumahan Nasional

		(HAPERNAS) dan hari Habitat Dunia 5. 5. Rapat koordinasi
	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Perumahan Perdesaan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas PSU lingkungan Perumahan Perdesaan
	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Saranan Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Terlaksananya pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)

Dari hasil analisa arahan kebijakan umum anggaran dan alokasi pendanaan KUA PPA 2014 untuk pembangunan sektor Perumahan didapatkan beberapa catatan penting terkait dengan sinkronisasi dengan sumber pendanaan lain khususnya APBN.

Tabel H.5

Arahan Kebijakan Umum Anggaran dan Sinkronisasi Pendanaan dari sumber lain

No	Sektor	Arahan Kebijakan Umum Anggaran	Sinkronisasi dengan sumber pendanaan lain
1	Perumahan	Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, melalui bantuan stimulan rumah layak huni, penyediaan Rumah Susun dan perbaikan sarana dan prasarana umum lingkungan agar tidak menjadi permukiman kumuh.	Keterbatasan anggaran Pemda DIY dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan melalui stimulan Rumah Layak Huni hanya mampu menangani 785 unit rumah tidak layak huni pada tahun 2014 ini, sehingga perlu lebih diperjelas alokasi penanganan RTLH masing-masing kecamatan miskin, serta perlunya data alokasi anggaran penanganan RTLH di masing-masing Kabupaten dan Kota yang bersumber dari Kemenpera agar penanganan RTLH dapat terpadu.

H.3 Perubahan APBD tahun 2013

Berdasarkan analisa permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing sub sektor dan program kegiatan yang telah diusulkan melalui APBD 2014, terdapat beberapa catatan yang bisa diusulkan menjadi agenda perubahan APBD 2013.

Tabel H. 6
Arahan Alternatif Usulan kegiatan melalui APBDP 2013

No	Sektor	Indikator Target RPJMD	Alternatif Usulan kegiatan melalui APBD P 2013
1	Perumahan	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin. APBD 2014 diharapkan dapat meningkatkan kualitas PSU pada lingkungan kumuh di 6 kawasan	NSPM Kawasan Kumuh harus mendapat fasilitasi legalisasi NSPM Kawasan Kumuh (misalnya dengan Peraturan Gubernur), dan diperlukan <i>mapping</i> kawasan kumuh agar kegiatan penanganan dapat dilaksanakan lebih fokus dan terarah.
		Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas. APBD 2014 diharapkan akan melakukan peningkatan kualitas PSU di lingkungan Perumahan Pedesaan di 7 komunitas dan pembangunan PSU di 15 lokasi komunitas Perumahan	Yang diperlukan adalah kegiatan-kegiatan pendampingan pemberdayaan komunitas perumahan secara berkelanjutan dan untuk membangun kesadaran bersama agar komunitas nantinya dapat mandiri menyelesaikan permasalahan lingkungannya.
		Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun. APBD 2014 menargetkan penanganan RTLH sebanyak 785 unit.	Perlu dilakukan pendataan dan sinkronisasi kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi DIY dan NSPM pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh berarti meliputi unsur luasan atau besaran, serta kepadatan. Sehingga pendekatan lokasi yang paling sesuai adalah lokasi di kota dan di pinggir sungai.

Berdasarkan hasil pencermatan APBDP 2013 yang diajukan oleh Dinas PU-P dan ESDM, khusus untuk sektor Perumahan dari tiga program yang ada tidak mengajukan usulan Perubahan tahun 2013 karena keterbatasan pagu anggaran Perubahan 2013.

H.4 KUA PPAS Sektor Perumahan Tahun 2014

Tabel H. 7
KUA PPAS Sektor Perumahan Tahun 2014

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wajib				
1.03	Pekerjaan Umum				
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				
1.04	Perumahan				
1.04.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				
1.04.1.03.01.15	Program Pengembangan Perumahan				
1.04.1.03.01.15.001	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun (RPJMD)	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	5 dokumen	350.000.000,00
1.04.1.03.01.15.002	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun (RPJMD)	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	1 dokumen	100.000.000,00
1.04.1.03.01.15.006	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun (RPJMD)	- Bnguntapan - Imogiri - Kasihan - Sewon - Gedang sari - Karangmojo - Playen - Ponjong - Semanu - Semin - Gdngtengen - Mergangsan - Tegalrejo - Umbulharjo - Kalibawang - Kokap - Samigaluh - Gamping - Prambanan - Seyegan	785 rumah	7.000.000.000,00
1.04.1.03.01.15.008	Monitoring dan Evaluasi program pusat di Daerah	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	2 laporan	50.000.000,00

Laporan Perencanaan Pembangunan Perumahan

		(RPJMD)			
1.04.1.03.01.22	Program Pengurangan Kawasan Kumuh				
1.04.1.03.01.22.001	Penataan Kawasan Kumuh	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin (RPJMD)	- Imogiri - Karangmojo - Ponjong - Mergangsan - Samigaluh - Prambanan	6 kawasan	3.600.000.000,00
1.04.1.03.01.23	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				
1.04.1.03.01.23.001	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	Persentase program pemberdayaan perumahan berbasis komunitas (RPJMD)	Lainnya : Daerah Istimewa Yogyakarta	6 laporan	150.000.000,00
1.04.1.03.01.23.002	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Perumahan Perdesaan	Persentase program pemberdayaan perumahan berbasis komunitas (RPJMD)	- Kasihan - Gedang sari - Semanu - Umbulharjo - Kalibawang - Kokap - Gamping	7 komunitas	700.000.000,00
1.04.1.03.01.23.003	Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Persentase program pemberdayaan perumahan berbasis komunitas (RPJMD)	- Imogiri - Kasihan - Sewon - Gedang sari - Playen - Semanu - Semin - Tegalrejo - Umbulharjo - Kalibawang - Kokap - Samigaluh - Gamping - Prambanan - Seyegan	15 komunitas	1.500.000.000,00

Sumber : Jogja Plan 2014